



TRIWULAN II

2024

LAPORAN KINERJA

SEKRETARIAT

**BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**



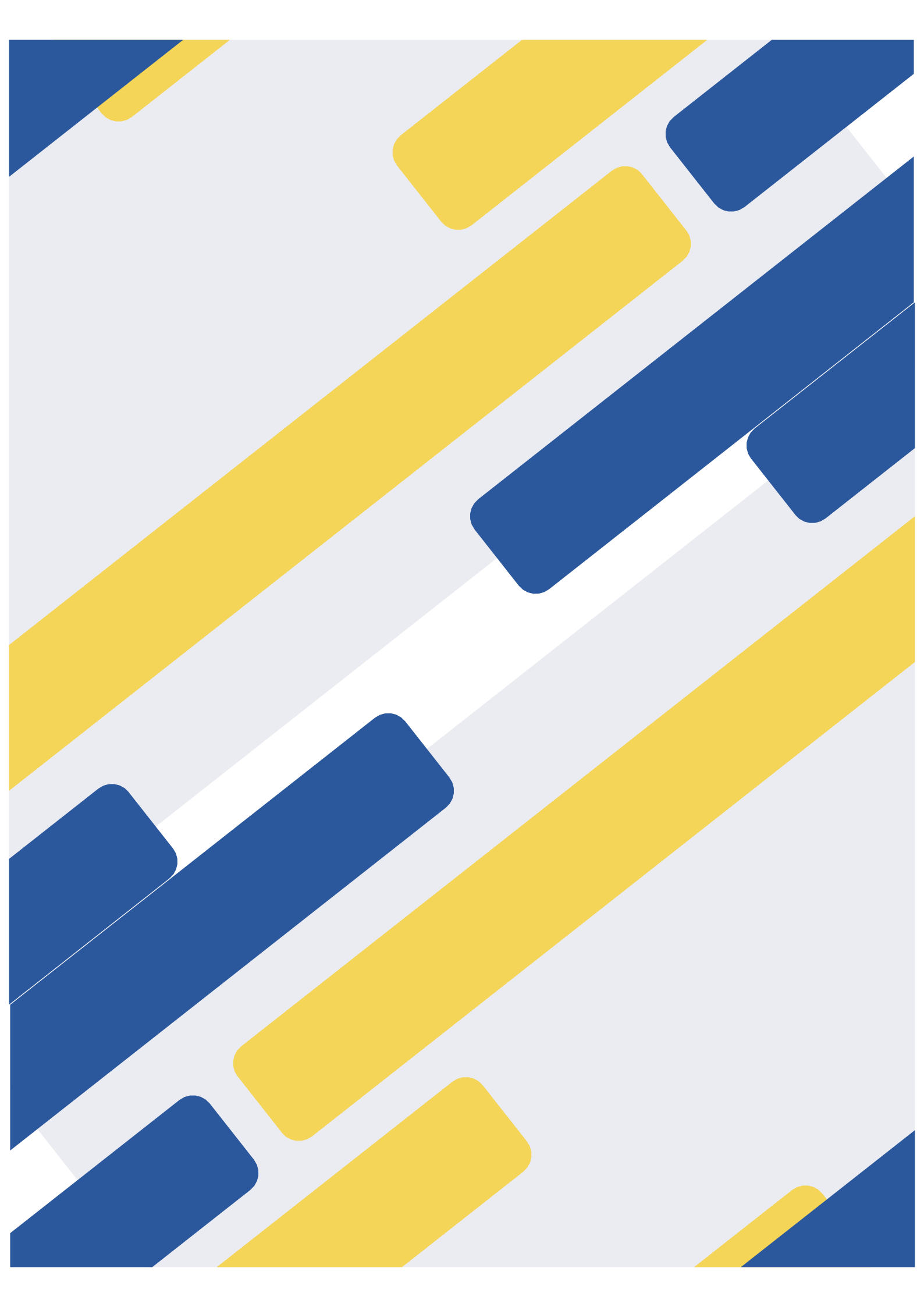
Gedung Mina Bahari III, Lantai 6 & 7,
Jalan Medan Merdeka Timur No. 16,
Jakarta 10110



021 3519070 (Hunting)
Fax : 021 3513287



bppsdm@kkp.go.id



KATA PENGANTAR



Puji syukur kepada Allah SWT karena atas berkah dan rahmat-Nya, Laporan Kinerja Sekretariat BPPSDM Triwulan II Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan Kinerja Sekretariat BPPSDM Triwulan II Tahun 2024 merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja Sekretariat BPPSDM sampai dengan triwulan II tahun 2024, dengan mengacu pada standar sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang diemban Sekretariat BPPSDM, laporan kinerja ini berfungsi sebagai alat penilai kinerja secara kuantitatif, merupakan wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat BPPSDM menuju terwujudnya *good governance*, dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat sekaligus alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja. Selanjutnya, laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara utuh atas Capaian Kinerja Sekretariat BPPSDM Triwulan II Tahun 2024. Akhirnya, dengan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas sumbangsih semua pihak yang turut mendukung pencapaian kinerja Sekretariat BPPSDM.

Jakarta, 18 Juli 2024

Sekretaris BPPSDM,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'R' followed by a long horizontal line.

Dr. Rudi Alek Wahyudin, S.Pi., M.Si


DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN	9
1.1. LATAR BELAKANG	9
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN	10
1.3. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	11
1.4. KERAGAAN SUMBERDAYA MANUSIA (SDM)	12
1.5. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA	13
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	15
2.1. RENCANA STRATEGIS	15
2.2. RENCANA KERJA TAHUNAN (RENJA) 2024	18
2.3. PERJANJIAN KINERJA (PK)	20
2.4. PENGUKURAN KINERJA	23
Bab III. AKUNTABILITAS KINERJA	25
3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	25
3.2. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA	26
3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN	73
3.4. EFISIENSI ANGGARAN DAN SEKRETARIAT BPPSDM	74
BAB IV. PENUTUP	75
4.1. KESIMPULAN	75
4.2. REKOMENDASI	78
LAMPIRAN	79



DAFTAR TABEL

- Tabel 1. Perubahan Indikator yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja BPPSDM 2024.
- Tabel 2. Anggaran Rencana Kerja Tahunan (RKT) Lingkup Sekretariat BPPSDM Tahun 2024
- Table 3. Perjanjian Kinerja Sekretariat BRSDM Per 2 April 2024
- Tabel 4. Status Indeks Capaian IKU
- Tabel 5. Capaian Kinerja Sekretariat BPPSDM Triwulan II Tahun 2024
- Tabel 6. Capaian Unit Kerja Yang Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) lingkungan BPPSDM (unit)
- Tabel 7. Satuan Kerja Lingkup BPPSDM Berpredikat WBK
- Tabel 8. Capaian Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Sekretariat BPPSDM (indeks)
- Tabel 9. Capaian Persentase unit kerja Sekretariat BRSDM yang menerapkan sistem Manajemen pengetahuan yang terstandar (%)
- Tabel 10. Capaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Sekretariat BRSDM (%)
- Tabel 11. IKU Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Sekretariat BPPSDM (nilai)
- Tabel 12. IKU Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan BPPSDM (%)
- Tabel 13. Penilaian Capaian Tahapan Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri
- Tabel 14. Perhitungan Progres Capaian Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri
- Tabel 15. Capaian Kerja Sama Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang Disepakati (Kesepakatan)
- Tabel 16. Capaian Kinerja Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Sekretariat BRSDM (%)



Tabel 17. Capaian Indeks Perencanaan Anggaran (indeks)

Tabel 18. Capaian Kinerja Persentase Pemenuhan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Sekretariat BRSDM tepat waktu (%)

Tabel 19. Capaian Kinerja Persentase Pemenuhan Layanan Perkantoran Sekretariat BRSDM tepat waktu (%)

Tabel 20. Realisasi Anggaran Sekretariat BPPSDM Triwulan II Tahun 2024

Tabel 21. Capaian Kinerja Sekretariat BPPSDM Triwulan II Tahun 2024



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Capaian Kinerja Sekretariat BPPSDM Triwulan II Tahun 2024

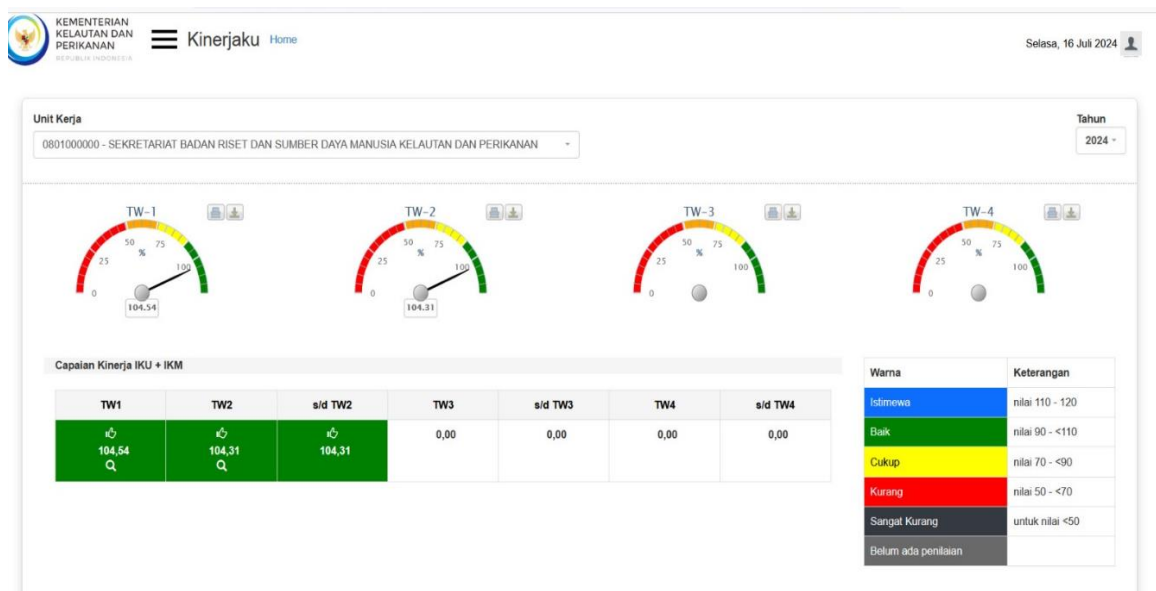
Gambar 2. Keragaan PNS Sekretariat BPPSDM per Juni 2024

Gambar 3. Capaian Kinerja Sekretariat BPPSDM Triwulan II Tahun 2024

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pada periode Triwulan II terdapat perubahan pada profil Rencana Kerja Sekretariat BPPSDM, yang disebabkan perubahan Unit Organisasi Pembina Administrasi dan Teknis Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan BPPSDM sesuai Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 206 Tahun 2024 Tentang Unit Organisasi Pembina Administrasi dan Teknis Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Penyuluhan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan. Sekretariat sebagai Unit Organisasi Pembina terhadap 9 (Sembilan) UPT sebagai berikut : Balai Riset Perikanan Laut; Balai Riset Budidaya Ikan Hias; Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan; Balai Riset Pemuliaan Ikan; Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir; Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil; Loka Riset Perikanan Tuna; Loka Riset Budidaya Rumput Laut; Loka Perencanaan Teknologi Kelautan.

Hasil pengukuran kinerja diperoleh data capaian kinerja Sekretariat BPPSDM Triwulan II Tahun 2024 sebesar 104,31 %, sebagaimana *dashboard* kinerja sebagai berikut:




Gambar 1. Capaian Kinerja Sekretariat BPPSDM Triwulan II Tahun 2024

Adapun rincian NKO pada masing-masing IKU disajikan sebagai berikut:

1. Unit Kerja yang berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Lingkup BPPSDM (unit) dengan target 15 unit dan capaian 15 unit, persentase capaian 100%.
2. Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat BPPSDM (indeks), target 79,25 dan capaian 82,32, persentase capaian 103,87%.
3. Persentase Unit kerja Sekretariat BPPSDM yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%), target 94 % dan capaian 113,89%, persentase capaian 120 %.
4. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Sekretariat BPPSDM (%), target 82 % dan capaian 93,22 %, persentase capaian 113,68 %.
5. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Sekretariat BPPSDM (nilai), target 83 dan capaian 86,77, persentase capaian 104,54.
6. Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan BPPSDM (%), target 60 % dan capaian 80%, persentase capaian 120%.
7. Kerja Sama Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang Disepakati (Kesepakatan), target 19 kesepakatan dan capaian 22 kesepakatan, persentase capaian 115,79%.
8. Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Sekretariat BPPSDM (%), target 100 % dan capaian 100 %, persentase capaian 100.
9. Indeks Perencanaan Anggaran (Indeks), target 80, capaian 80,13, persentase capaian 100,16 %.





10. Persentase Pemenuhan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Sekretariat BPPSDM tepat waktu (%), target 100 % dan capaian 100 %, persentase capaian 100 %.

11. Persentase Pemenuhan Layanan Perkantoran Sekretariat BPPSDM tepat waktu (%), target 100 % dan capaian 100 %, persentase capaian 100 %.

Berkenaan hasil capaian pada Triwulan II, maka diperlukan perhatian terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja dipertahankan dalam rangka mendukung terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta mendorong pencapaian reformasi birokrasi melalui pencapaian target-target kinerja, maka pemantauan dan pengukuran kinerja perlu dilakukan secara sistematis dan berkala dalam rangka memitigasi indikator-indikator yang mengalami hambatan-hambatan dalam pencapaian kinerja.
2. Bukti dukung capaian kinerja dipersiapkan dengan baik sebagai wujud akuntabilitas atas pelaporan kinerja yang disajikan.
3. Seluruh Indikator kinerja perlu dilakukan pengawalan dengan baik guna memastikan bahwa capaian akhir tahun dapat memenuhi target yang telah ditetapkan.


BAB I. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagai bentuk atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan kepada setiap entitas pelaporan wajib menyajikan laporan keuangan dan laporan kinerja. Sekretariat BPPSDM sebagai entitas tersebut wajib membuat laporan keuangan dan kinerja yang didasari pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Lebih lanjut, akuntabilitas kinerja didefinisikan sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan - kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, sejumlah peraturan perundang-undangan menjadi *guidance* bagi praktik-praktik penyelenggaraan pemerintahan yang mengedepankan *good governance* dan *clean government*, antara lain:

1. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

- 
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan.
 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan
 8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
 9. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 205 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan kinerja ini disusun dalam rangka pemenuhan kewajiban atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan tujuan:


1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; dan

2. Melakukan perbaikan berkesinambungan bagi instansi guna pencapaian target tahunan.

1.3. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) mengalami perubahan kelembagaan pada tahun 2023 menjadi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM) Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sedangkan kelembagaan Sekretariat Badan Riset dan SDM KP, menjadi Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM) mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sekretariat BPPSDM dipimpin oleh seorang Sekretaris Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPPSDM. Sekretariat BPPSDM mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan badan. Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat menjalankan fungsi:

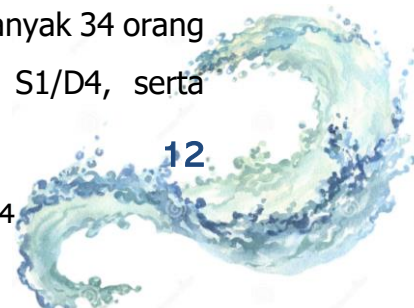
1. Koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan kinerja organisasi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
2. Koordinasi pengelolaan keuangan dan barang milik negara/kekayaan negara pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
3. Koordinasi pengelolaan sumber daya manusia aparatur, organisasi, dan tata laksana pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;

- 
4. Koordinasi penyusunan produk hukum, pelaksanaan advokasi hukum, dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
 5. Koordinasi pengelolaan hubungan masyarakat dan layanan informasi publik serta peningkatan kualitas pelayanan publik pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
 6. Koordinasi pengelolaan kerja sama pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
 7. Koordinasi pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, persuratan, dan kearsipan pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
 8. Koordinasi pengelolaan data dan informasi pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
 9. Pelaksanaan reformasi birokrasi pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan; dan
 10. Pelaksanaan urusan administrasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

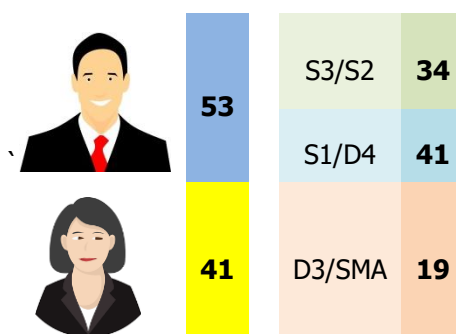
Susunan organisasi Sekretariat Badan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

1.4. KERAGAAN SUMBERDAYA MANUSIA (SDM)

Sekretariat BPPSDM didukung oleh 124 personil yang terdiri atas 94 Aparatur Sipil Negara, terdiri dari 92 Pegawai Negeri Sipil dan 2 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dan 45 Tenaga non ASN, terdiri dari 31 PPNPN dan 12 PJLP. Dari 94 Aparatur Sipil Negara, terdiri dari 53 laki-laki dan 41 perempuan. Berdasarkan tingkat pendidikan, sebanyak 34 orang berpendidikan S2/S3, sebanyak 41 orang berpendidikan S1/D4, serta



sebanyak 19 orang berpendidikan D3/SMA (Data Kepegawaian, per Juni 2024). Saat ini terdapat 2 pegawai sedang tugas belajar S2 dan 1 orang pegawai sedang tugas belajar S3. Dari 94 jumlah ASN di Sekretariat BPPSDM, 5 orang diantaranya dipekerjakan/ditugaskan pada instansi lain.




Gambar 1. Keragaan PNS Sekretariat BPPSDM per Juni 2024

1.5. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA

Merujuk Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, Sistematika laporan sebagai berikut:

1. **Ringkasan Eksekutif**, pada bagian ini berisi ringkasan dari laporan ini, antara lain berisi uraian singkat tentang tujuan, sasaran, capaian kinerja dan kendala selama triwulan II tahun 2024.
2. **Bab I Pendahuluan**, pada bab ini berisi hal-hal umum tentang Sekretariat BPPSDM seperti tugas dan fungsi, struktur organisasi, serta keragaan pegawai di Sekretariat BPPSDM.
3. **Bab II Perencanaan Kinerja**, pada bab ini uraian singkat tentang rencana strategis Sekretariat BPPSDM 2020-2024, rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja Sekretariat BPPSDM tahun 2024 serta pengukuran kinerja.



4. **Bab III Akuntabilitas Kinerja**, bab ini dijelaskan hasil capaian kinerja dari indicator-indikator kinerja yang telah diuraikan pada bab sebelumnya disertai beberapa capaian indikator kinerja lainnya.

5. **Bab IV Penutup**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

6. **Lampiran:**

- 1) Perjanjian Kinerja;
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDMKP) tahun 2020-2024, mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDMKP) tahun 2021-2024 Nomor 180/PER-BRSDM/2021 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020. Kemudian untukantisipasi perubahan kelembagaan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDMKP) dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang BRIN, yang membuat peleburan berbagai lembaga serta tugas dan fungsi riset ke dalam BRIN sehingga diperlukan penyesuaian nomenklatur dari BRSDMKP menjadi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP). Menindaklanjuti perkembangan arah kebijakan/program/kegiatan yang mengakibatkan perubahan pada Sasaran/Indikator/volume target dilakukan reviu terhadap Sasaran/Indikator/volume target pada Renstra BRSDMKP tahun 2020 – 2024 berdasarkan analisis capaian, analisis tindak lanjut dan action plan yang akan dilakukan untuk mengoptimalkan capaian kinerja.

Penyesuaian Sasaran/Indikator/volume/target tersebut dituangkan dalam Bab II Reviu Renstra BPPSDMKP Uraian Hasil Reviu dengan dasar perubahan Target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) antara lain dokumen Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 205 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja KKP Tahun 2024.

Tabel 1. Perubahan Indikator yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja BPPSDM 2024


SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM		TARGET 2024			KET
				RENSTRA	RENJA	PK	
1	SDM KP Peserta Diklat yang Terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri	1	Persentase Lulusan Pendidikan dan Pelatihan KP yang Terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri (%)	75	72	72	(a)
		2	Nilai PNBP BPPSDM (Rupiah Miliar)	-	-	32,134	
2	SDM KP Peserta Diklat yang Membentuk Start Up (Usaha Rintisan)	3	Lulusan pendidikan dan pelatihan yang membentuk start up (usaha rintisan) (orang)	255	392	402	(a)
3	Kelompok Kelautan dan Perikanan yang ditumbuhkan dan dikembangkan	4	Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang Dibentuk (kelompok)	2.000	3.000	4.000	(a)
		5	Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kelasnya (kelompok)	1.500	1.800	2.000	(a)
		6	Tenaga kerja yang terlibat lingkup BPPSDM (orang)	-	-	12.500	
4	Iptek Hasil Kegiatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan KP yang Dimanfaatkan oleh Masyarakat	7	Desa/kawasan mitra yang menerapkan Iptek KP (Desa Perikanan Cerdas) (desa)	11	15	15	(b)
5	Sarana dan Prasarana Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan yang Ditingkatkan	8	Sarana dan Prasarana Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (unit)	-	44	53	
6	Hasil Perumusan Kebijakan dan Inkubator Bisnis Kelautan dan Perikanan yang mendukung kesejahteraan masyarakat	9	Perumusan Kebijakan KP yang digunakan untuk Penyusunan Kebijakan (Kebijakan)	30	-	-	
			Perumusan Kebijakan Responsif KP yang digunakan untuk penyusunan kebijakan (kebijakan)	-	8	8	(c)

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM		TARGET 2024			KET
				RENSTRA	RENJA	PK	
7	Tatakelola pemerintahan yang baik Lingkup BRSDM	10	Nilai PM PRB Lingkup BPPSDM (nilai)	36	33,5	-	
		11	Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Lingkup BPPSDM (unit)	13	16	17	(a)
		12	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK BRSDM dibandingkan Realisasi Anggaran BPPSDM TA 2022 (%)	<1	≤0,5	<0,5	(a)
		13	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPPSDM (indeks)	76	79	79	(a)
		14	Nilai PM SAKIP BPPSDM (nilai)	86,75	77	81	(a)
		15	Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPPSDM (nilai)	3	3,3	3,3	(a)
		16	Persentase Unit kerja Lingkup BPPSDM yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	90	94	94	(a)
		17	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup BPPSDM (%)	80	80	82	(a)
		18	Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan BPPSDM (Nilai)	1 (unit kerja)	76	76	
		19	Nilai IKPA Lingkup BPPSDM (nilai)	90	93,76	93,76	(a)
		20	Nilai NKA Lingkup BPPSDM (nilai)	89	86	86	(a)
		21	Persentase Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup BPPSDM (%)	72,5	80	80	(a)
		22	Persentase Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup BPPSDM (%)	72,5	80	80	(a)
		23	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (orang)	5.000	5.423	5.423	(a)

Sumber : *Reviu Renstra BPPSDM Tahun 2024*

Penjelasan Kolom Keterangan pada Tabel 1:





Target tahun 2024 pada Renstra perlu dilakukan penyesuaian dengan justifikasi antara lain:

- (a). Prognosa capaian 2023;
- (b). Penyesuaian kebijakan BPPSDM berupa dukungan terhadap program prioritas KKP; dan
- (c). Penyesuaian terkait beralihnya tuisi kebijakan pada BPPSDM.


2.2. RENCANA KERJA TAHUNAN (RENJA) 2024

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, dan sasaran strategis, maka BPPSDM Tahun 2024 terdapat 3 program yaitu, Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan, dan Program Dukungan Manajemen. Pada Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi terdapat 5 sasaran program dan 8 indikator kinerja program, Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan terdapat 1 sasaran program dan 1 indikator kinerja program, serta pada program dukungan manajemen terdapat 1 sasaran program dan 14 indikator kinerja program.

Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi didukung oleh kegiatan Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan dengan kode kegiatan 2375, kegiatan Pendidikan Kelautan dan Perikanan dengan kode 2376.

Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan didukung oleh kegiatan Perumusan Kebijakan Kelautan dan Perikanan dengan kode kegiatan 6703, kegiatan Inkubasi Bisnis Kelautan dan Perikanan dengan kode kegiatan 6704, kegiatan Pengujian Kelayakan Teknologi Kelautan dan Perikanan dengan kode kegiatan 6705, dan kegiatan Analisis Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan dengan kegiatan 6706.

Program Dukungan Manajemen didukung oleh 2 kegiatan yaitu kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dengan kode kegiatan 2378, dan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur KP dengan kode kegiatan 4345.



Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur KP ditempatkan pada program dukungan manajemen sesuai surat dari Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor S-122/MK.2/2020 tanggal 24 Juni 2020 perihal Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran yang menyebutkan bahwa sepanjang program Pendidikan dan pelatihan diperuntukkan bagi SDM aparatur internal K/L.

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi dan sasaran strategis, maka Rencana Kerja Sekretariat BRSDM Tahun 2024 pada kegiatan dukungan manajemen internal lingkup BRSDM, menetapkan 3 Sasaran Kegiatan yaitu :(1). Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen BRSDM; (2). Terpenuhinya Layanan Sarana dan Prasarana Internal Sekretariat BRSDM; dan (3). Terpenuhinya Layanan Perkantoran Sekretariat BRSDM. Rincian anggaran pada setiap Sasaran Kegiatan sebagai berikut:

Pada periode Triwulan II terdapat perubahan pada profil Rencana Kerja Sekretariat BPPSDM, yang disebabkan perubahan Unit Organisasi Pembina Administrasi dan Teknis Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan BPPSDM sesuai Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 206 Tahun 2024 Tentang Unit Organisasi Pembina Administrasi dan Teknis Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Penyuluhan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

Sekretariat sebagai Unit Organisasi Pembina terhadap 9 (Sembilan) UPT sebagai berikut :

1. Balai Riset Perikanan Laut
2. Balai Riset Budidaya Ikan Hias
3. Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan
4. Balai Riset Pemuliaan Ikan
5. Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir

6. Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil
7. Loka Riset Perikanan Tuna
8. Loka Riset Budidaya Rumput Laut
9. Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan.

Rincian Anggaran UPT *ex* Riset di lingkungan Sekretariat BPPSDM sebagai berikut :

Table 2. Anggaran Rencana Kerja Tahunan (RKT) Sekretariat BPPSDM dan UPT *ex* Riset Lingkup Sekretariat BPPSDM Tahun 2024

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat BPPSDM	62.500.000.000
2.	Loka Riset Sumber Daya Dan Kerentanan Pesisir	6.233.730.000
3.	Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan	4.523.513.000
4.	Balai Riset Perikanan Laut	5.571.946.000
5.	Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan	6.954.877.000
6.	Loka Riset Perikanan Tuna	6.612.506.000
7.	Balai Riset Budidaya Ikan Hias	11.729.974.000
8.	Balai Riset Pemuliaan Ikan	10.857.446.000
9.	Loka Riset Budidaya Rumput Laut	3.683.042.000
10.	Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan	4.581.931.000
Total Anggaran Lingkup Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Tahun 2024		123.248.965.000

Sumber Data: PK Sekretariat BPPSDM tanggal 2 April 2024

2.3. PERJANJIAN KINERJA (PK)

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan maka diperlukan indikator kinerja dan target kinerja yang dituangkan ke dalam perjanjian kinerja (PK). Perjanjian kinerja merupakan instrumen pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja,



dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja yang menjadi tekad serta janji pimpinan unit kerja kepada pimpinan tertinggi Kementerian/Lembaga untuk menerima amanah/tanggung jawab/kinerja yang diberikan serta menjalankan target yang ditetapkan.

Sekretariat BRSDM memiliki 3 sasaran kegiatan pada Tahun 2024 yaitu: (1). Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen BRSDM; (2). Terpenuhinya Layanan Sarana dan Prasarana Internal Sekretariat BRSDM; dan (3). Terpenuhinya Layanan Perkantoran Sekretariat BRSDM.

Perjanjian Kinerja Sekretariat BRSDM Tahun 2024 ditandatangani pada tanggal 27 Desember 2023, dengan 3 (tiga) Sasaran Kegiatan dan 31 (tiga puluh satu) IKU. Revisi PK Sekretariat BPPSDM yang ditandatangani pada tanggal 2 April 2024, dengan perubahan sebagai berikut : (1). perubahan pejabat penandatangan semula "Sekretariat BRSDM" menjadi "Plt. Sekretaris BPPSDM"; (2). perubahan nomenklatur semula "Sekretariat BRSDM" menjadi "Sekretariat BPPSDM" dan (3). perubahan nomenklatur IKU semula "Nilai PNBP BPPSDM" menjadi "Nilai PNBP Satker BLU dan non BLU BPPSDM".

PK Sekretariat BPPSDM per tanggal 2 April 2024, secara rinci pada tabel berikut:

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Sekretariat BPPSDM Per 2 April 2024

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen BPPSDM	1	Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Lingkungan BPPSDM (unit)	17
		2	Unit kerja yang dibangun untuk diusulkan menuju WBK Lingkungan BPPSDM (unit/Satker)	8
		3	Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK BPPSDM (%)	≤0,5
		4	Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat BPPSDM (indeks)	85

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
		5	Penilaian Mandiri SAKIP BPPSDM (nilai)	81
		6	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Sekretariat BPPSDM (Nilai)	94
		7	Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPPSDM (nilai)	3,3
		8	Persentase Unit kerja Sekretariat BPPSDM yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	94
		9	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Sekretariat BPPSDM (%)	82
		10	Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik BPPSDM (%)	76
		11	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Sekretariat BRSDM (nilai)	93,76
		12	Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat BPPSDM (nilai)	82
		13	Tingkat Kepatuhan BMN BPPSDM (%)	80
		14	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BPPSDM (%)	80
		15	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan BPPSDM (%)	100
		16	Nilai PNBP Satker BLU dan non BLU BPPSDM (Rupiah Miliar)	32,134
		17	Tenaga Kerja yang Terlibat Lingkup BPPSDM (orang)	12.500
		18	Kerja Sama Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang Disepakati (Kesepakatan)	47
		19	Persentase Tindak Lanjut Kerja Sama Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang Disepakati (%)	73
		20	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Sekretariat BPPSDM (%)	100

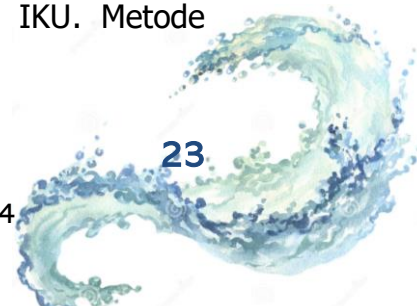
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
		21	Persentase Permasalahan Hukum di Lingkungan BPPSDM yang Ditangani (%)	100
		22	Nilai Keterbukaan Informasi Publik BPPSDM (Nilai)	91
		23	Indeks Perencanaan Program (Indeks)	80
		24	Indeks Perencanaan Anggaran (Indeks)	80
		25	Nilai Perencanaan Strategis dan Lintas Sektor (Nilai)	80
		26	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Lingkungan BPPSDM (Nilai Kualitas)	3,5
		27	Satuan kerja yang diusulkan sebagai satker Badan Layanan Umum / BLU (satker)	1
		28	Nilai Pengawasan Kearsipan Sekretariat BPPSDM	90
2	Terpenuhinya Layanan Sarana dan Prasarana Internal Sekretariat BPPSDM	29	Persentase pemenuhan layanan Sarana dan Prasarana Sekretariat BPPSDM (%)	100
3	Terpenuhinya Layanan Perkantoran Sekretariat BPPSDM	30	Persentase Pemenuhan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Sekretariat BPPSDM tepat waktu (%)	100
		31	Persentase Pemenuhan Layanan Perkantoran Sekretariat BPPSDM tepat waktu (%)	100

Sumber : PK Sekretariat BPPSDM tanggal 2 April 2024

2.4. PENGUKURAN KINERJA

1. Teknik Penghitungan

Pengukuran capaian kinerja Sekretariat BPPSDM Tahun 2024 dilakukan dengan membandingkan antara data target dan realisasi IKU. Metode



tersebut akan dikonversi menjadi indeks capaian IKU. Ketentuan penetapan indeks capaian IKU adalah:

1. Capaian maksimum adalah 120%;
2. Capaian minimum adalah 0%;
3. Formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda; dan
4. Status indeks capaian IKU adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Status Indeks Capaian IKU

Warna	Rentang Nilai	Status Indeks
Blue	Nilai 110 - 120	Istimewa
Green	Nilai 90 - <110	Baik
Yellow	Nilai 70 - <90	Cukup
Red	Nilai 50 - <70	Kurang
Grey	Nilai <50	Sangat Kurang
Grey		Belum ada penilaian

2. Tata Cara Pengukuran Kinerja

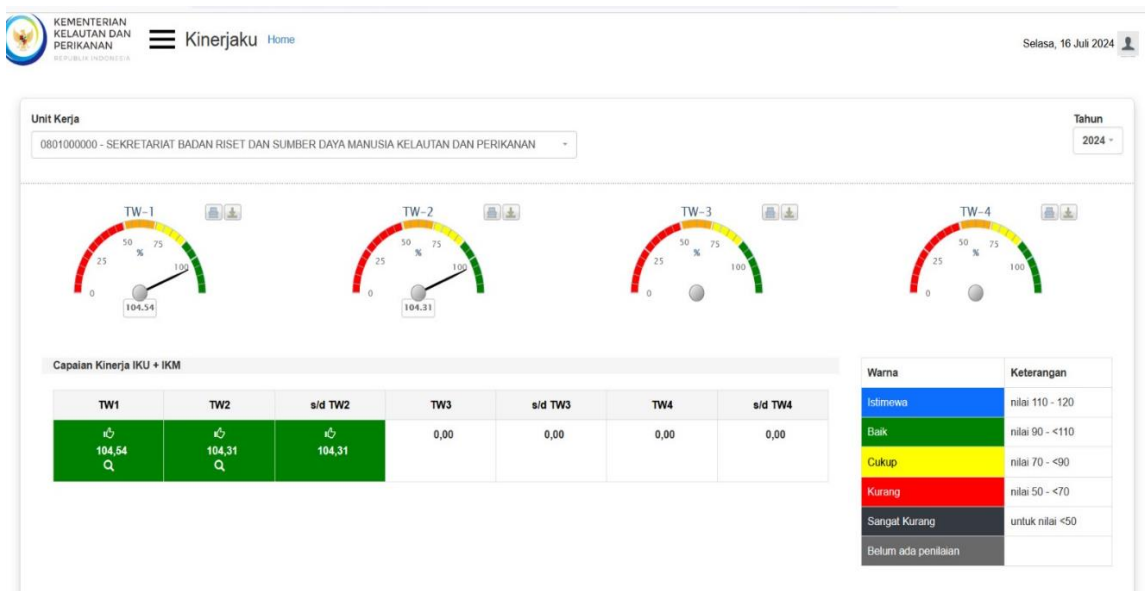
Metode pengukuran kinerja Sekretariat BPPSDM dilakukan secara berkala setiap triwulan, yaitu bulan Maret, Juni, September dan Desember. Pengukuran kinerja dilaksanakan oleh tim yang melaksanakan pengukuran dan pelaporan kinerja. Pengukuran kinerja dilaksanakan secara berjenjang dari masing-masing penanggung jawab IKU hingga level Pimpinan. Tahapan terakhir dalam proses pengukuran kinerja adalah verifikasi dan validasi capaian kinerja. Hal ini untuk memastikan bahwa capaian yang dilaporkan di aplikasi Kinerjaku sesuai dengan data dukung yang dilampirkan oleh masing-masing satuan kerja.



Bab III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja Sekretariat BPPSDM tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama (*key performance indicator*, disingkat KPI). Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak yang terintegrasi di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dari hasil pengukuran kinerja diperoleh data capaian kinerja Sekretariat BPPSDM Triwulan II Tahun 2024 sebesar 104,31 %, sebagaimana *dashboard* kinerja sebagai berikut:



Gambar 3. Capaian Kinerja Sekretariat BPPSDM Triwulan II Tahun 2024

Sekretariat BPPSDM pada Triwulan II Tahun 2024 mengampu program dukungan manajemen yang didukung oleh kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup BPPSDM yang terdiri atas 31 (tiga puluh satu) IKU. Berdasarkan kategori pencapaian kinerja, sebanyak 6 IKU berkinerja Baik (nilai 90 - < 110), dan 1 IKU berkinerja Istimewa (nilai 110 – 120). Faktor

tersebut yang menjadi pengungkit sehingga capaian NKO Sekretariat BPPSDM di kategorikan baik berdasarkan indeks pada Aplikasi Kinerja (gambar 2).

3.2. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Evaluasi dan analisis kinerja dilakukan dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sebagaimana Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Evaluasi dan analisis kinerja menampilkan perbandingan target (rencana) dengan realisasi tahun berjalan, kinerja dengan tahun sebelumnya dan target jangka menengah berikut analisis keberhasilan/penurunan kinerja pada indikator kinerja utama di masing-masing Sasaran Kegiatan.

Sekretariat BPPSDM sesuai PK per 2 April 2024, menjalankan 3 (tiga) Sasaran Kegiatan dengan 31 IKU, dengan capaian secara rinci pada tabel berikut:

Tabel 4. Capaian Kinerja Sekretariat BPPSDM Triwulan II Tahun 2024

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN 2024	Triwulan II		
			Target	Capaian	%
1 Terpenuhiya Layanan Dukungan Manajemen BPPSDM	1 Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Lingkungan BPPSDM (unit)	17	15	15	100
	2 Unit kerja yang dibangun untuk diusulkan menuju WBK Lingkungan BPPSDM (unit/Satker)	8			
	3 Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK BPPSDM (%)	≤0,5			
	4 Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat BPPSDM (indeks)	85	79,25	82,32	103,87
	5 Penilaian Mandiri SAKIP BPPSDM (nilai)	81			
	6 Nilai Rekonsiliasi Kinerja Sekretariat BPPSDM (Nilai)	94			

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET TAHUNAN 2024	Triwulan II		
				Target	Capaian	%
	7	Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPPSDM (nilai)	3,3			
	8	Persentase Unit kerja Sekretariat BPPSDM yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	94	94	113,89	120
	9	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Sekretariat BPPSDM (%)	82	82	93,22	113,68
	10	Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik BPPSDM (%)	76			
	11	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Sekretariat BRSDM (nilai)	93,76	83	86,77	104,54
	12	Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat BPPSDM (nilai)	82			
	13	Tingkat Kepatuhan BMN BPPSDM (%)	80			
	14	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BPPSDM (%)	80			
	15	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan BPPSDM (%)	100	60	80	120
	16	Nilai PNPB Satker BLU dan non BLU BPPSDM (Rupiah Miliar)	32,134			
	17	Tenaga Kerja yang Terlibat Lingkup BPPSDM (orang)	12.500			
	18	Kerja Sama Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang Disepakati (Kesepakatan)	47	19	22	115,79
	19	Persentase Tindak Lanjut Kerja Sama Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang Disepakati (%)	73			
	20	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Sekretariat BPPSDM (%)	100	100	100	100
	21	Persentase Permasalahan Hukum di Lingkungan BPPSDM yang Ditangani (%)	100			

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN 2024	Triwulan II			
			Target	Capaian	%	
	22	Nilai Keterbukaan Informasi Publik BPPSDM (Nilai)	91			
	23	Indeks Perencanaan Program (Indeks)	80			
	24	Indeks Perencanaan Anggaran (Indeks)	80	80	80,13	100,16
	25	Nilai Perencanaan Strategis dan Lintas Sektor (Nilai)	80			
	26	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Lingkungan BPPSDM (Nilai Kualitas)	3,5			
	27	Satuan kerja yang diusulkan sebagai satker Badan Layanan Umum / BLU (satker)	1			
	28	Nilai Pengawasan Kearsipan Sekretariat BPPSDM	90			
2	Terpenuhinya Layanan Sarana dan Prasarana Internal Sekretariat BPPSDM	29	Persentase pemenuhan layanan Sarana dan Prasarana Sekretariat BPPSDM (%)	100		
3	Terpenuhinya Layanan Perkantoran Sekretariat BPPSDM	30	Persentase Pemenuhan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Sekretariat BPPSDM tepat waktu (%)	100	100	100
		31	Persentase Pemenuhan Layanan Perkantoran Sekretariat BPPSDM tepat waktu (%)	100	100	100


SASARAN KEGIATAN -1

TERPENUHINYA LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN BPPSDM

Sasaran kegiatan "Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen BPPSDM" didukung oleh 28 (dua puluh delapan) indikator kinerja utama (IKU) yang ditetapkan dan diukur keberhasilannya sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA 1

Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Lingkungan BPPSDM (unit)



IKU ini didefinisikan sebagai jumlah unit kerja lingkup BPPSDM yang berpredikat menuju WBK. Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Instansi Pemerintah, pembangunan zona integritas dianggap sebagai role mode pelaksanaan reformasi birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas. Dengan demikian pembangunan zona integritas menjadi aspek penting dalam pencegahan korupsi di pemerintahan sehingga setiap unit kerja Eselon I lingkup KKP sebagai unit pembangun integritas berperan untuk mendorong terwujudnya WBK dan WBBM pada masing-masing unit kerjanya.

Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi, BPPSDM KP menetapkan satuan kerja untuk menjadi proyek percontohan. Penetapan Satker sebagai WBK tersebut dimaksudkan sebagai kompetisi dalam penerapan pelaksanaan reformasi birokrasi pada Satker di lingkungan BPPSDM dengan menerapkan instrumen Zona Integritas berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pembangunan Integritas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik, yang telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

Pengukuran IKU ini dilakukan triwulanan, adapun capaian atas indikator kinerja Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Lingkungan BPPSDM (unit) adalah sebagai berikut :

Tabel 5. Capaian Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Lingkungan BPPSDM (unit)

IKU-1. Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Lingkungan BPPSDM (unit)								
Realisasi Triwulan II			Triwulan II Tahun 2024			% Kenaikan Trw II 2023-2024	Reviu Renstra Sekretariat BPPSDM 2024	
2020-2022			Target	Realisasi	% Capaian		Target 2024	% Capaian thd target 2024
2021	2022	2023						
8	10	13	15	15	100	15,38	17	88,24

Capaian IKU Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Lingkungan BPPSDM (unit) pada triwulan II sebanyak 15 unit, dari target sebanyak 15 unit (100%). Jika dibandingkan dengan capaian triwulan II tahun 2023 terdapat kenaikan 15,38%, sedangkan apabila dibandingkan dengan target Renstra, telah mencapai 88,24%.

Capaian sebanyak 15 satker, merupakan akumulasi dari jumlah satker di lingkungan BPPSDM yang mendapat predikat WBK mulai tahun 2017 sampai tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6. Satuan Kerja Lingkup BPPSDM Berpredikat WBK

No	Satuan Kerja	Tahun Perolehan
1	Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Pontianak	2017
2	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan (BRPBAP3) Maros	2017
3	Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan (BBRBLPP) Gondol	2017
4	Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Tegal	2017
5	Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Waeheru	2018
6	Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Banyuwangi	2018
7	Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan (BPRPUPP) Palembang	2019
8	Balai Riset Pemuliaan Ikan Sukamandi	2021

No	Satuan Kerja	Tahun Perolehan
9	Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Medan	2021
10	Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan	2022
11	Politeknik Ahli Usaha Perikanan Jakarta	2022
12.	Balai Diklat Aparatur Sukamandi	2022
13.	Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon	2023
14.	Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran	2023
15.	Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo	2023

Capaian IKU Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) lingkup BPPSDM selama periode tahun 2017 - 2023 sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA						
Jumlah Unit Kerja lingkup BPPSDM Berpredikat Menuju WBK (satker, kumulatif)						
Realisasi						
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
4	6	7	7	9	12	15

Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM adalah :


1. Komitmen pimpinan dan semua pegawai dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan menularkan semangat dan visi yang sama;
2. Kemudahan pelayanan dengan menyediakan fasilitas yang lebih baik;
3. Membuat program yang membuat unit kerja lebih dekat ke masyarakat sehingga masyarakat merasakan kehadiran unit kerja tersebut;
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan bahwa program yang sedang dijalankan tetap di jalurnya.

Beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam pembangunan zona integritas menuju WBK antara lain :



1. Hasil penilaian TPI pada unit kerja/satuan kerja yang diajukan telah memenuhi ambang batas penilaian, yaitu total nilai pengungkit dan hasil minimal 75.00 dengan minimal nilai pengungkit 40 untuk Menuju WBK dan minimal 85.00 dengan minimal nilai pengungkit 48 untuk Menuju WBBM;
2. Bobot nilai per area pengungkit minimal 60% pada semua area pengungkit untuk predikat Menuju WBK dan bobot nilai per area pengungkit minimal 75% pada semua area pengungkit untuk predikat Menuju WBBM;
3. Nilai komponen hasil "Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN" minimal 18,50 untuk Menuju WBK dan 18,88 untuk menuju WBBM dengan ketentuan nilai sub komponen "Survei Persepsi Anti Korupsi" minimal 13,5 untuk Menuju WBK dan 13,88 untuk menuju WBBM atau minimal skor survei 3,60 untuk Menuju WBK dan skor survei 3,70 untuk menuju WBBM, serta nilai sub komponen "Persentasi TLHP" minimal 5,0 untuk Menuju WBK dan Menuju WBBM;
4. Nilai komponen hasil "Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan publik kepada Masyarakat" minimal 15,00 atau skor survei minimal 3,00 untuk unit kerja/satuan kerja yang diajukan berpredikat Menuju WBK dan minimal 17,00 atau skor survei minimal 3,40 untuk unit kerja/satuan kerja yang diajukan berpredikat Menuju WBBM;
5. Kriteria Pengajuan Usulan ZI Menuju WBK/WBBM adalah LHKASN dan LHKPN 100% (sesuai dengan Bab II Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah);

Kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator kinerja ini diantaranya adalah kegiatan-kegiatan pendampingan kepada UPT terkait dengan melibatkan Pusat dan Inspektorat Jenderal KKP. Hal ini sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 62/PERMEN-KP/2017, bahwa unit kerja



yang telah berpredikat WBK lebih dari 2 (dua) tahun dilakukan penilaian ulang untuk mempertahankan predikat WBK.

INDIKATOR KINERJA 2


Unit kerja yang dibangun untuk diusulkan menuju WBK lingkungan BPPSDM (unit/Satker)

IKU ini didefinisikan sebagai jumlah unit kerja lingkup BPPSDM yang dilakukan pembangunan zona integritas untuk selanjutnya dinilai menjadi unit kerja yang berpredikat menuju WBK. Hal ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Eselon I untuk melakukan pendampingan dan pembangunan zona integritas kepada unit kerja terpilih sebelum dilakukan penilaian menjadi unit kerja yang berpredikat menuju WBK.


BPPSDM melalui Nota Dinas Nomor 285/BPPSDM.1/KP.750/I/2024 tanggal 29 Januari 2024 Hal Pengajuan Unit Kerja yang akan dibangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan BPPSDM Tahun 2024 sebanyak 8 unit kerja yaitu : (1). Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Bitung; (2). Politeknik KP Bitung; (3). Politeknik KP Karawang; (4). Politeknik KP Jember; (5). Politeknik KP Dumai; (6). Politeknik KP Sorong; (7). Politeknik KP Kupang; dan (8). Politeknik KP Bone.

Adapun penetapan unit kerja yang dibangun menuju WBK tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 114 Tahun 2024 tentang Penetapan Unit Pelaksana Teknis Yang Dibangun Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan BPPSDM KP Tahun 2024.

Dalam upaya pencapaian target indikator kinerja unit yang dibangun menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) lingkup BPPSDM, diperlukan komitmen dan peran serta seluruh entitas lingkup BPPSDM untuk mencapai tujuan pencegahan korupsi, melalui beberapa indikator kinerja yaitu :

- 
1. **Tingkat Pelaporan Korupsi:** Indikator ini mengukur jumlah laporan korupsi atau perilaku tidak etis yang diterima oleh unit anti-korupsi dalam periode waktu tertentu. Jika jumlah laporan meningkat, ini bisa menandakan bahwa kesadaran akan korupsi meningkat dan masyarakat atau karyawan merasa lebih nyaman melaporkan kecurigaan.
 2. **Tingkat Penanganan Kasus:** Indikator ini mengukur seberapa cepat dan seberapa baik unit anti-korupsi menangani kasus-kasus yang dilaporkan. Semakin cepat kasus ditangani dan diselesaikan, semakin tinggi efektivitas unit tersebut.
 3. **Pengukuran Kepuasan Stakeholder:** Melakukan survei atau pemantauan secara reguler terhadap stakeholder, termasuk karyawan, manajemen, dan masyarakat umum, untuk mengukur tingkat kepuasan mereka terhadap kinerja unit anti-korupsi.
 4. **Tingkat Kepatuhan Terhadap Kode Etik dan Kebijakan:** Mengukur sejauh mana karyawan dan anggota organisasi mematuhi kode etik, kebijakan anti-korupsi, dan prosedur yang ditetapkan oleh unit WBK.
 5. **Peningkatan Kesadaran dan Pendidikan:** Menilai efektivitas program pendidikan dan pelatihan yang diberikan oleh unit anti-korupsi, dan seberapa banyak kesadaran terhadap korupsi dan pentingnya pencegahan korupsi meningkat di kalangan karyawan dan masyarakat umum.
 6. **Penurunan Kasus Korupsi:** Indikator ini mengukur apakah ada penurunan kasus korupsi yang dilaporkan atau terdeteksi setelah unit anti-korupsi didirikan atau diperkuat. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan berhasil mengurangi kejadian korupsi.
 7. **Penghargaan dan Pengakuan:** Penerimaan penghargaan atau pengakuan dari lembaga atau organisasi independen atas kinerja unit anti-korupsi dalam mendorong Wilayah Bebas dari Korupsi.

Penggunaan dan pengukuran indikator-indikator ini dapat membantu mengevaluasi kesuksesan unit kerja dalam mencapai tujuan WBK. Penting



untuk terus memonitor dan mengevaluasi kinerja secara berkala serta melakukan perbaikan berkelanjutan agar unit anti-korupsi tetap efektif dan relevan dalam upaya pencegahan korupsi.

Sampai dengan triwulan II ini sudah dilakukan pendampingan ke UPT yang diusulkan untuk dibangun menuju WBK, antara lain BPPP Bitung, Politeknik KP Dumai, Politeknik KP Kupang, Politeknik KP Sorong dan Politeknik KP Bone. IKU Unit kerja yang dibangun untuk diusulkan menuju WBK lingkungan BPPSDM (unit/Satker) diukur Tahunan, dengan polarisasi *maximize*.

INDIKATOR KINERJA 3

Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK BPPSDM (%)

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Atas LK BPPSDM merupakan audit oleh auditor atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

IKU Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK BPPSDM (%) diukur Tahunan dengan polarisasi *minimize*.

Adapun kegiatan yang mendukung tercapainya indikator kinerja dimaksud antara lain:

1. Melakukan pembinaan tertib administrasi keuangan seluruh Satker lingkup BPPSDM;
2. Melakukan rekonsiliasi laporan keuangan;
3. Melakukan koordinasi dengan Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal KKP, Inspektorat Jenderal dan Mitra K/L lain;

- Melakukan percepatan tindak lanjut atas rekomendasi temuan yang dilakukan audit internal maupun eksternal.

INDIKATOR KINERJA 4

Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Sekretariat BPPSDM (indeks)

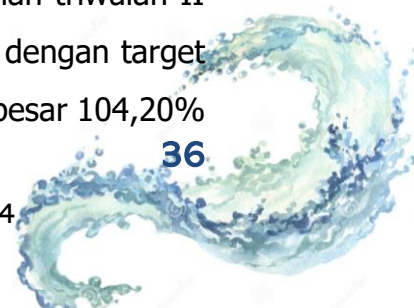
Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Pengukuran Indeks Profesionalitas adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. Indeks profesionalitas ASN terdiri dari 4 (empat) dimensi penilaian yaitu kualifikasi dengan bobot maksimal 25, kompetensi dengan bobot maksimal 40, kinerja dengan bobot maksimal 30 dan disiplin dengan bobot maksimal 5.


Pengukuran IKU ini dilakukan semesteran. Capaian IKU Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Sekretariat BPPSDM (indeks) sebagai berikut:

Tabel 7. Capaian Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Sekretariat BPPSDM (indeks)

IKU-4. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Sekretariat BPPSDM (indeks)								
Realisasi Triwulan II			Triwulan II Tahun 2024			% Kenaikan Trw II 2023-2024	Reviu Renstra Sekretariat BPPSDM 2024	
2020-2022			Target	Realisasi	% Capaian		Target 2024	% Capaian thd target 2024
2021	2022	2023						
68,47	75,08	79,25	79,25	82,32	103,87	3,87	79	104.20

Capaian IKU Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Sekretariat BPPSDM (indeks) pada triwulan II sebesar 82,32 dari target 79,25 (103,87%). Capaian ini sesuai Surat Sekretaris BPPSDM An Kepala BPPSDM no B.5458/BPPSDM.1/TU.210/VII/2024 tanggal 12 Juli 2024 perihal Capaian IP ASN Semester I Tahun 2024. Jika dibandingkan dengan capaian triwulan II tahun 2023, terjadi peningkatan sebesar 3,8 %. Dibandingkan dengan target Renstra, presentase capaian telah melampaui target Renstra sebesar 104,20%





Faktor yang mendukung keberhasilan capaian IKU antara lain:

1. Keaktifan Pengelola SDM Sekretariat BPPSDM dalam menyampaikan informasi pelaksanaan pelatihan daring melalui whatsapp group Kepegawaian BPPSDM dan Pegawai Sekretariat BPPSDM, melakukan monitoring pada *dashboard* IP ASN KKP (ropeg.kkp.go.id) dan berkoordinasi dengan Pengelola SDM Biro SDM Aparatur dan Organisasi yang menangani IP ASN, sehingga pegawai dapat memperoleh informasi pelatihan dan dapat mengikuti pelatihan tersebut serta progres nilai IPASN dapat terpantau secara berkala.
2. Keaktifan pegawai dalam mengikuti pelatihan, entri dan unggah sertifikat pada aplikasi MyASN (myasn.bkn.go.id) masing-masing pegawai
3. Keaktifan operator SIASN dan approval SIASN dalam melakukan verifikasi data pelatihan dan approval dalam melakukan *approve* terhadap sertifikat dan data yang diunggah oleh pegawai.


Kegiatan pendukung capaian IKU antara lain:

1. Melakukan sosialisasi secara daring dan menerbitkan sertifikat;
2. Sosialisasi terkait IP ASN dan MyASN yang dilakukan secara daring melalui zoom meeting dan Youtube BPPSDM bagi seluruh pegawai lingkup BPPSDM;
3. Diseminasi Profesi Dosen di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan.

INDIKATOR KINERJA 5

Penilaian Mandiri SAKIP BPPSDM (nilai)

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mengamanatkan Instansi pemerintah untuk lebih akuntabel dan lebih bertanggung jawab terhadap kinerja atau hasil yang telah dicapai.




Pada tahun 2024, IKU PM SAKIP BPPSDM memiliki target sebesar 81, dengan periode pengukuran Tahunan. Kegiatan yang telah dilakukan dalam upaya implementasi SAKIP di lingkungan BPPSDM antara lain :

1. *Kick Off Meeting* Implementasi SAKIP dan Rekonsiliasi Dokumen SAKIP Pra Penilaian Mandiri Tahun 2024 Lingkup BPPSDMKP, pada tanggal 14 – 16 Mei 2024, yang diikuti oleh pejabat eselon I, eselon II, para Kepala UPT dan pengelola kinerja di lingkungan BPPSDM.
2. Pendampingan Penilaian Mandiri SAKIP level 3 UPT lingkup BPPSDM selama periode Mei – Juni 2024 dilaksanakan di 5 (lima) Zona, yaitu Zona I bertempat di STP Kampus Serang, Zona II bertempat di BPPP Tegal, Zona III bertempat di BRPSDI Jatiluhur, Zona IV bertempat di BPPP Medan dan Zona V bertempat di SUPM Pariaman.
3. Penilaian Mandiri (PM) dan verifikasi bukti dukung SAKIP level II lingkup BPPSDM, pada tanggal 20-22 Mei 2024 bertempat di Politeknik AUP Kampus Cikaret Bogor. Proses tersebut menggunakan aplikasi DSMS BPPSDM dengan *up load* dokumen yang kemudian dilakukan verifikasi dan pembinaan oleh tim evaluator.
4. Penilaian Mandiri (PM) dan verifikasi bukti dukung SAKIP level I BPPSDM yang dilakukan oleh Tim Inspektorat III, pada tanggal 10 – 13 Juli 2024. Hasil PM SAKIP BPPSDM masih nilai sementara yang akan dilakukan Pleno di tingkat KKP.

INDIKATOR KINERJA 6

Nilai Rekonsiliasi Kinerja Sekretariat BRSDM (Nilai)

Nilai rekonsiliasi kinerja Sekretariat BRSDM merupakan *quick assessment* terhadap SAKIP instansi. Rekonsiliasi kinerja dilakukan untuk meningkatkan pemahaman para pengelola kinerja di seluruh satuan kerja BPPSDM, menjadi sarana bersama untuk mengidentifikasi terhadap perubahan dan perkembangan pengelolaan kinerja dan sebagai sarana pendampingan terhadap satker di lingkungan BPPSDM untuk mengawal SAKIP menjadi lebih



baik. Penilaian mencakup aspek kepatuhan (25%), aspek kesesuaian (25%), aspek ketercapaian (30%) dan ketepatan (20%). IKU Nilai Rekonsiliasi Kinerja di *cascading* ke seluruh satker di lingkungan BPPSDM.

Pengukuran IKU Nilai Rekonsiliasi Kinerja Sekretariat BRSDM (Nilai) adalah tahunan dengan polarisasi *maximize*.

INDIKATOR KINERJA 7

Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPPSDM (nilai)

Maturitas Implementasi Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian *intern* pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Keuangan Nomor B.603/SJ.2/TU.210/II/2024 tentang Penyampaian Indikator Kinerja Utama Maturitas Penyelenggaraan SPIP KKP dan Unit Eselon I, kemudian setelah dilakukan evaluasi kinerja oleh Biro Perencanaan dan Inspektorat I disarankan agar nilai target ditingkatkan hal ini didasarkan atas pertimbangan capaian nilai tahun sebelumnya sehingga disimpulkan bahwa Unit Eselon I dapat menentukan target Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Unit Eselon I pada Tahun 2024 dengan rentang nilai sebesar 3,3 sampai dengan 3,7.

IKU Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPPSDM (nilai) dilakukan pengukuran Tahunan. Kegiatan yang telah dilakukan antara lain: menghadiri Rapat Pengisian Kertas Kerja Penetapan Tujuan dan Pencapaian Tujuan SPIP KKP yang diselenggarakan bIro Perencanaan pada tanggal 19 Juni 2024; menghadiri Rapat Persiapan Penilaian Mandiri Maturitas SPIP pada Komponen Struktur dan Proses yang diselenggarakan Biro Keuangan pada tanggal 21 Juni 2024; Menghadiri Asistensi Input Data Pada Aplikasi Penilaian Mandiri dan

Penjaminan Kualitas atas Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi yang diselenggarakan Biro Perencanaan pada tanggal 26 – 28 Juni 2024.

INDIKATOR KINERJA 8

Persentase Unit kerja Sekretariat BPPSDM yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)

Manajemen pengetahuan merupakan proses untuk menciptakan, menyimpan, mentransfer dan menerapkan pengetahuan dalam organisasi. Manajemen pengetahuan erat kaitannya dengan kolaborasi sehingga pengetahuan yang dihasilkan akan bermanfaat ketika disampaikan kepada pihak- pihak terkait, baik di dalam maupun di luar organisasi.


Capaian IKU Persentase unit kerja BPPSDM yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%) sebagai berikut:

Tabel 8. Persentase Unit kerja Sekretariat BPPSDM yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)

IKU-8. Persentase Unit kerja Sekretariat BPPSDM yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)								
Realisasi Triwulan II			Triwulan II Tahun 2024			% Kenaikan Trw II 2023-2024	Reviu Renstra Sekretariat BPPSDM 2024	
2021-2023			Target	Realisasi	% Capaian		Target 2024	% Capaian thd target 2024
2021	2022	2023						
100	100	100	94	113,89	120	121,16	94	121,16

Capaian IKU Persentase Unit kerja Sekretariat BPPSDM yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%) triwulan II Tahun 2024 sebesar 113,89 7% dari target 94 % atau 120 %. Capaian ini sesuai surat Plt. Sekretaris BPPSDM An Kepala BPPSDM nomor B. 5362 /BPPSDM.1/TU.210/VII/2024 tanggal 8 Juli 2024 perihal Capaian Nilai Akhir IKU MP Terstandar Lingkup KKP. Jika dibandingkan dengan capaian triwulan II tahun 2023, terjadi peningkatan sebesar 121,16 %. Dibandingkan dengan





target Renstra, presentase capaian telah melampaui target Renstra sebesar 121,16 %

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini antara lain faktor komitmen Pimpinan baik pejabat eselon I maupun eselon II di lingkungan BPPSDM yang berkontribusi secara aktif pada aplikasi *collaboration office*, berupa informasi dengan ketentuan 5W + 1H, infografis dan Video.

Kegiatan pendukung yang menjadi katalis ketercepaian realisasi seperti kegiatan sosialisasi aplikasi *collaboration office* dan pemutakhiran manual IKU sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar kepada seluruh satker di lingkungan BPPSDM sehingga pemahaman terkait perubahan pola hitung pasca beralih dari *bitrix24.com* dapat terinformasikan dengan baik bagi seluruh satuan kerja.

INDIKATOR KINERJA 9

Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Sekretariat BPPSDM (%)

Indikator kinerja Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Sekretariat BPPSDM (%) merupakan jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen (Audit, Reviu, dan Evaluasi) yang terbit pada periode 1 Oktober 2023 s.d 31 Maret 2024 atau Triwulan IV Tahun 2023 s.d Triwulan I Tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh seluruh mitra kerja yang menjadi obyek pengawasan.

Pengukuran IKU ini dilakukan secara Triwulanan dengan polarisasi *Maximize*. Capaian IKU Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Sekretariat BPPSDM (%) sebagai berikut:

Tabel 9. Capaian Kinerja Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Sekretariat BPPSDM (%)

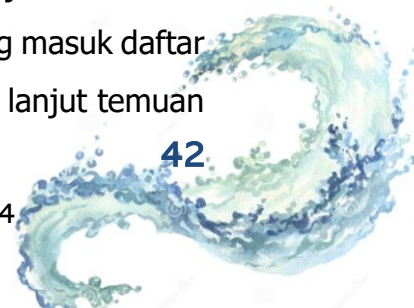
IKU-9. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Sekretariat BPPSDM (%)								
Realisasi Triwulan II			Triwulan II Tahun 2024			% Kenaikan Trw II 2023-2024	Reviu Renstra Sekretariat BPPSDM 2024	
2021-2023			Target	Realisasi	% Capaian		Target 2024	% Capaian thd target 2024
2021	2022	2023						
64,81	72,34	94	82	93,22	113,68	-0,83	82	113,68

Realisasi capaian IKU ini pada triwulan II tahun 2024 adalah sebesar 93,22 % dari target 82 % atau 113,68 %. Capaian ini sesuai Surat Plt Sekretaris BPPSDM An Kepala BPPSDM no B.5430 /BPPSDM.1/HP.510/VII/2024 tanggal 11 Juli 2024 perihal Capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Triwulan II Tahun 2024 Lingkup BPPSDM KP". Jika dibandingkan dengan capaian triwulan II tahun 2023, terjadi penurunan sebesar 0,83 %. Dibandingkan dengan target Renstra, presentase capaian telah melampaui target Renstra sebesar 113,68 %

Keberhasilan pencapaian IKU Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Sekretariat BPPSDM (%), dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Komitmen pimpinan dan seluruh entitas lingkup Sekretariat BPPSDM untuk menyelesaikan rekomendasi temuan dengan melengkapi seluruh dokumen tindaklanjut dan menyampaikan ke Inspektorat Jenderal.
2. Pengawasan bersama melalui rapat/kordinasi dengan melibatkan Tim Itjen.
3. Pemantauan rutin oleh PIC tindaklanjut rekomendasi LHE Itjen pada Sub Koordinator Keuangan Sekretariat Badan, kepada PIC pada satker *auditeed*.

Kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian IKU Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Sekretariat BPPSDM (%), antara lain : Koordinasi dengan satuan kerja yang masuk daftar temuan pada lingkup BPPSDM dalam rangka percepatan tindak lanjut temuan



tersebut; Melakukan kompilasi berkas/dokumen tindaklanjut sesuai rekomendasi Tim Auditor Inspektorat Jenderal; Melakukan penginputan/mengupload dokumen tindaklanjut ke dalam aplikasi SIDAK; Melakukan koordinasi sekaligus penyampaian dokumen Tindak lanjut yang sudah di upload dalam aplikasi SIDAK dan melakukan koordinasi dengan tim Auditor terkait BATL hasil penyampaian dokumen Tindak Lanjut.

INDIKATOR KINERJA 10

Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik BPPSDM (%)

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No. 7/2021, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kriteria Inovasi adalah memiliki kebaruan, efektif, bermanfaat, dapat ditransfer/direplikasi, berkelanjutan. Inovasi yang dimaksud adalah inovasi yang memenuhi seluruh kriteria yang ditetapkan dan memenuhi semangat tema KIPP yang ditentukan oleh Kemen PANRB.

Pengukuran IKU Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik BPPSDM (%) dilakukan secara tahunan dengan polarisasi *maximize*.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam upaya mendukung capaian IKU adalah :

1. Sosialisasi Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) oleh Inspektorat III dan dihadiri oleh UPT Lingkup BPPSDM (22 April 2024).
2. Penetapan nama dan jenis layanan publik UPT Lingkup BPPSDM TA 2024 (8 Mei 2024).
3. Asistensi dan Monitoring Pelayanan Publik oleh Tim Pelayanan Publik BPPSDM (13-21 Mei 2024).

4. Inventarisasi standar pelayanan dan unit pelayanan publik lingkup BPPSDM oleh Tim Pelayanan Publik BPPSDM (17-21 Mei 2024).
5. Pengajuan proposal inovasi pelayanan publik dari UPT Lingkup BPPSDM kepada Tim Pelayanan Publik BPPSDM (31 Mei 2024).
6. Bimbingan Teknis Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) oleh Sekretariat BPPSDM diikuti oleh seluruh UPT Lingkup BPPSDM (20 Juni 2024).

INDIKATOR KINERJA 11

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Sekretariat BPPSDM (nilai)

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Sekretariat BPPSDM, merupakan alat ukur untuk menentukan tingkat kinerja satker khususnya dalam pelaksanaan anggaran. Pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel yang terkait dengan pelaksanaan anggaran sebagai indikatornya, yaitu Revisi DIPA (10), Deviasi Halaman III DIPA (15), Penyerapan Anggaran (bobot 20), (%), Belanja Kontraktual (10), Penyelesaian Tagihan (10), (10), Capaian Output (25) dan Dispensasi SPM sebagai pengurang. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) menjadi ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Pengukuran IKU ini dilakukan secara semesteran dengan polarisasi *Maximize*. Capaian IKU Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Sekretariat BPPSDM (nilai) sebagai berikut:

Tabel 10. IKU Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Sekretariat BPPSDM (nilai)

IKU-11. IKU Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Sekretariat BPPSDM (nilai)								
Realisasi Triwulan II			Triwulan II Tahun 2024			% Kenaikan Trw II 2023-2024	Reviu Renstra Sekretariat BPPSDM 2024	
2021-2023			Target	Realisasi	% Capaian		Target 2024	% Capaian thd target 2024
2021	2022	2023						
80,14	70,72	87,21	83	86,77	104,54	-0,51	93,76	92,54

Capaian IKU Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Sekretariat BPPSDM triwulan II Tahun 2024 sebesar 86,77 % dari target 83 % atau 104,54 %. Capaian ini sesuai Nota Dinas Kepala Biro Keuangan nomor 2161/SJ.2/KU.130/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024 perihal Capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Semester I Tahun 2024. Jika dibandingkan dengan capaian triwulan II tahun 2023, terjadi penurunan sebesar 0,51%. Dibandingkan dengan target Renstra, telah mencapai 92,54 %.

Meskipun telah mencapai target secara total, namun pada Komponen Penilaian tertentu masih terdapat nilai yang belum tercapai, yaitu: Deviasi halaman III DIPA: 10,07 (67,10%); Penyerapan Anggaran: 18,67 (93,37%); dan Pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan: 9,53 (95,3%); Capaian Output 18,50 dari target 25,00 (73,98%).

Faktor yang dapat menjadi penghambat dalam pencapaian IKU ini antara lain kebutuhan dan dinamisasi organisasi yang cukup tinggi sehingga memerlukan dukungan anggaran dan berimplikasi atas deviasi halaman III DIPA, penyelesaian tagihan kegiatan, serta capaian output.

Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam upaya pendukung capaian IKU, berupa penyusunan program dan anggaran, penyelesaian revisi anggaran, serta rapat koordinasi perencanaan program dan anggaran.



INDIKATOR KINERJA 12

Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat BRSDM (nilai)

Untuk periode TA 2024, perhitungan Nilai Kinerja Anggaran mengacu pada PMK 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang disajikan pada Aplikasi Monev Kemenkeu (dahulu Aplikasi SMART DJA).

Indikator kinerja anggaran yang merupakan hasil penjumlahan dari 50% (lima puluh persen) nilai kinerja perencanaan anggaran dan 50% (lima puluh persen) nilai kinerja pelaksanaan anggaran.

Penilaian kinerja anggaran merupakan proses untuk menghasilkan nilai kinerja anggaran. Penilaian kinerja perencanaan anggaran untuk Kementerian/Lembaga dilakukan terhadap:

- a. Kinerja anggaran tingkat Satker;
- b. Kinerja anggaran tingkat Unit Eselon I; dan
- c. Kinerja anggaran tingkat Kementerian/Lembaga.

Proses penilaian kinerja perencanaan anggaran dimulai dengan tahapan (1) pengukuran variabel kinerja perencanaan anggaran berdasarkan data yang diperoleh dari sistem informasi dan dilanjutkan dengan (2) perhitungan nilai kinerja perencanaan anggaran pada setiap tingkatan. Adapun variabel kinerja perencanaan anggaran yang diukur, terdiri atas:

Untuk pelaksanaan anggaran sendiri telah disediakan informasinya pada Aplikasi OMSPAN dan Monev Kemenkeu terkait penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Pengukuran IKU Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat BRSDM dilakukan Tahunan dengan polarisasi *maximize*.

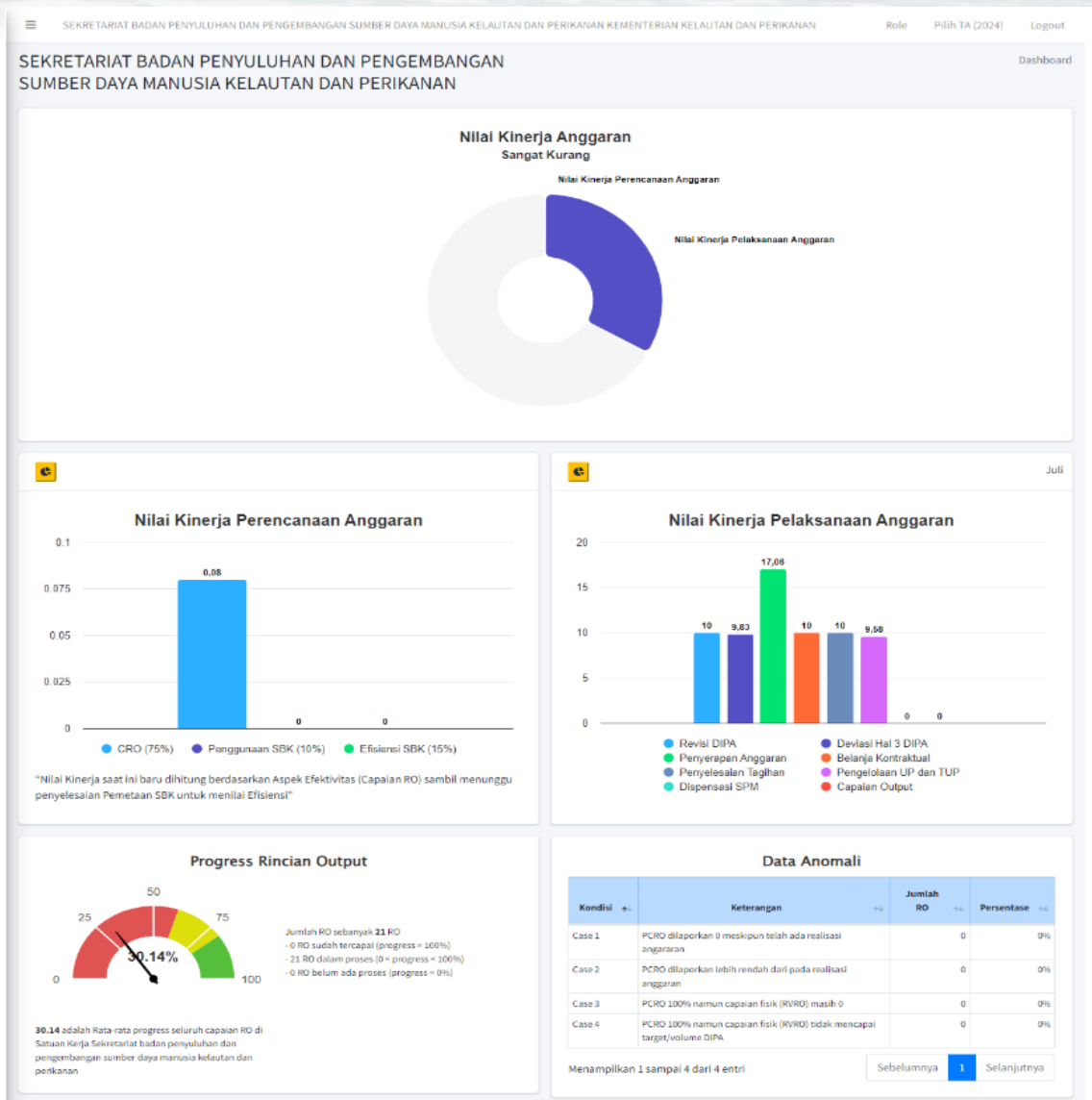
Sampai dengan periode Triwulan II TA 2024, kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung IKU, antara lain :

1. Tanggal 29 Januari 2024 telah dilaksanakan Rapat Assessment Rincian Output (RO) Tahun Anggaran 2024 yang dihadiri oleh perwakilan Eselon I Lingkup KKP.



2. Tanggal 28 Februari 2024 telah dilaksanakan Rapat Evaluasi Pelaksanaan Anggaran TA 2023 dan Koordinasi Pelaksanaan Anggaran TA 2024 yang dihadiri oleh perwakilan Eselon I Lingkup KKP.
3. Tanggal 2 April 2024 telah dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dan Nilai Kinerja Anggaran di Lingkungan KKP Triwulan I TA 2024 yang dilaksanakan oleh Biro Keuangan dan dihadiri oleh perwakilan Eselon I Lingkup KKP.
4. Tanggal 3 April 2024 telah dilaksanakan Sosialisasi Pelaporan Proyeksi Target dan Realisasi Capaian Output TA 2024 yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan dan dihadiri oleh perwakilan Eselon I Lingkup KKP.
5. Tanggal 23 April 2024 telah dilaksanakan Bimbingan Teknis Capaian Output bagi Satker Lingkup KPPN Jakarta VI yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan dan dihadiri oleh perwakilan Eselon I Lingkup KKP.
6. Tanggal 5 Juni 2024 telah dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja serta Pemantauan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) s.d bulan Mei 2024 di Lingkungan KKP yang dilaksanakan oleh Biro Keuangan dan dihadiri oleh perwakilan Eselon I Lingkup KKP.

Pihak DJA, Kementerian Keuangan saat ini tengah menyusun formulasi Nilai Kinerja Anggaran pada Aplikasi Monev Kemenkeu, dan nilai yang didapat saat ini masih Sangat Kurang, mengingat proses perhitungan secara utuh baru dapat dilakukan setelah seluruh sistem tersedia dan capaian kinerja khususnya Kinerja Program tercapai pada akhir tahun. Status Nilai Sementara Kinerja Anggaran Sekretariat BPPSDM TA 2024 sampai dengan saat ini seperti terlihat pada Gambar berikut.




INDIKATOR KINERJA 13

Tingkat Kepatuhan BMN BPPSDM (%)

IKU Tingkat Kepatuhan BMN BPPSDM (%) merupakan suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup BPPSDM telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tingkat Kepatuhan BMN BPPSDM (%) diukur atas 5 komponen yaitu:

1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2023 (bobot 12,5%);

- 
2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan III tahun 2023 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%);
 3. Tersedianya usulan penghapusan BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai dengan Triwulan III Tahun 2023 (bobot 25%);
 4. Penggunaan BMN Hasil pengadaan belanja modal Tahun 2022 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST/Berita Acara Pemakaian) (bobot 25%);
 5. Penyusunan/penyampaian Laporan BMN Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 12,5%).

Pengukuran capaian IKU ini dilakukan pada Tahunan dengan polarisasi *maximize*.


Kegiatan yang telah dilakukan dalam upaya mendukung pencapaian IKU tingkat kepatuhan pengelolaan BMN antara lain :

1. Melakukan identifikasi, inventarisasi dan asersi aset property investasi pada 6 satker lingkup BPPSDM bersama Inspektorat V (BP3 Tegal, BP3 Banyuwangi, BBRBLPP Gondol, Poltek KP Kupang, BRPBAP3 Maros, dan BP3 Ambon).
2. Identifikasi aset eks Deptan yang rusak berat dan masih tercatat dalam neraca aset BPPSDM pada 6 satker lingkup BPPSDM bersama Inspektorat V (BP3 Tegal, BP3 Banyuwangi, BBRBLPP Gondol, Poltek KP Kupang, BRPBAP3 Maros, dan BP3 Ambon).
3. Melaksanakan rekonsiliasi dan penyusunan LK BMN Semester I TA 2024 Lingkup BPPSDM.

INDIKATOR KINERJA 14

Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang /Jasa BPPSDM (%)

IKU Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BPPSDM (%), merupakan suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengadaan



Barang/Jasa lingkup BPPSDM yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terdapat 6 komponen penilaian yang terdiri atas: (1). Ketersediaan Manajemen Risiko Pengadaan Barang dan Jasa Strategis (10%); (2). Perencanaan dan Persiapan Pengadaan (15%); (3). Persentase Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilaksanakan melalui SPSE (10%); (4). Kesesuaian Tahap Pelaksanaan (45%); (5). Laporan Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa (5%); (6). Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan pengadaan barang/jasa lingkup Eselon I Triwulan I s.d. Triwulan III Tahun 2023 (15%).

Periode pengukuran pada IKU ini yaitu tahunan dengan polarisasi maximize. Kegiatan pendukung pencapaian IKU Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BPPSDM antara lain :

1. Pengisian kertas kerja reviu dalam rangka Pemantauan Anggaran dan PBJ Triwulan II TA 2024 bersama Inspektorat III.
2. Pembinaan dan pemantauan progress PBJ di Poltek KP Kupang

INDIKATOR KINERJA 15

Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan BPPSDM (%)

IKU ini didefinisikan sebagai jumlah peraturan perundang-undangan lingkup BPPSDM yang dapat diselesaikan (sampai dengan proses penyampaian permohonan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Kementerian Hukum dan HAM atau penyampaian penetapan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Menteri) hingga 30 Juni 2024, dibandingkan dengan jumlah peraturan perundang-undangan yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 204 Tahun 2023 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024. Penilaian capaian dilakukan setiap Semester.

Pengukuran IKU ini dilakukan secara semesteran dengan polarisasi *Maximize*. Capaian IKU Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan BPPSDM (%) sebagai berikut:

Tabel 11. IKU Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan BPPSDM (%)

IKU-15. IKU Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan BPPSDM (%)								
Realisasi Triwulan II			Triwulan II Tahun 2024			% Kenaikan Trw II 2023-2024	Reviu Renstra Sekretariat BPPSDM 2024	
2021-2023			Target	Realisasi	% Capaian		Target 2024	% Capaian thd target 2024
2021	2022	2023						
97,81	100	50	60	80	120	60	89	89,88

Capaian IKU Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan BPPSDM (%) triwulan II Tahun 2024 sebesar 80% dari target 60% atau 120%. Capaian ini sesuai Nota Dinas Kepala Biro Hukum Nomor 1306/SJ.4/HK.160/VII/2024 tanggal 1 Juli 2024 perihal Evaluasi Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 Triwulan II. Jika dibandingkan dengan capaian triwulan II tahun 2023, terjadi peningkatan sebesar 60 %. Dibandingkan dengan target Renstra, presentase capaian telah mencapai 89,88 %.

Perhitungan capaian setiap tahapan Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 12. Penilaian Capaian Tahapan Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri

RANCANGAN PERMEN-KP			RANCANGAN KEPMEN-KP		
No.	Tahapan	Capaian (%)	No	Tahapan	Capaian (%)
1.	Penyampaian rancangan ke Biro Hukum	20	1.	Penyampaian rancangan ke Biro Hukum	20
2.	Analisis sistematika dan materi muatan oleh Biro Hukum	35	2.	Analisis sistematika dan materi muatan oleh Biro Hukum	35

3.	Permohonan masukan/ tanggapan kepada unit kerja terkait	50	3.	Permohonan masukan/ tanggapan kepada unit kerja terkait	50
4.	Pembahasan rancangan	75	4.	Pembahasan rancangan	70
5.	Permohonan harmonisasi rancangan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	100	5.	Permohonan paraf persetujuan pimpinan unit kerja terkait	85
			6.	Penetapan Menteri/ Sekretaris Jenderal atas nama Menteri	100

Berdasarkan matriks program penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024, BPPSDM mempunyai target penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan pada Semester II sebanyak 5 produk hukum. Berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Hukum 1306/SJ.4/HK.160/VII/2024 tanggal 1 Juli 2024, hasil rapat Evaluasi Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 Triwulan II, pada tanggal 28 Juni 2024, capaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan BPPSDM KP Tahun 2024 Triwulan II sebesar 80% (delapan puluh persen), dengan realisasi sebagai berikut:

Tabel 13. Perhitungan Progres Capaian Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	PROGRES	CAPAIAN PROGRES
I. PERATURAN MENTERI				
1.	Peraturan Menteri	Perubahan atas Permen KP Nomor 33 Tahun 2021 tentang Log Book Penangkapan Ikan, Pemantauan Di Atas Kapal Penangkap Ikan Dan Kapal Pengangkut Ikan,	a. Telah diselenggarakan rapat pembahasan pada tanggal 14 Maret 2024, berdasarkan undangan Kepala Biro Hukum atas nama Sekretaris Jenderal, Nomor B.467/SJ.4/TU.330/III/2024, tanggal 13 Maret 2024, hal Undangan Rapat;	75%

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	PROGRES	CAPAIAN PROGRES
I.	PERATURAN MENTERI			
		Inspeksi, Pengujian, Dan Penandaan Kapal Perikanan, Serta Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan	<p>b. Rancangan Peraturan Menteri dimaksud dikembalikan kepada pemrakarsa untuk penyempurnaan materi oleh Ditjen Perikanan Tangkap, melalui nota dinas Kepala Biro Hukum, Nomor 484/SJ.4/HK.160/III/2024, tanggal 18 Maret 2024, hal Pengembalian Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021</p> <p>c. Telah disampaikan nota dinas Kepala Biro Hukum kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 1153/SJ.4/TU.210/VI/2024, tanggal 13 Juni 2024, hal Percepatan Penyelesaian Materi Muatan Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Sertifikasi Awak Kapal Perikanan</p>	
2.	Peraturan Menteri	Pedoman Umum Penumbuhan Kelompok, Gabungan Kelompok Sektor Kelautan dan Perikanan	a. Proses permohonan masukan/ tanggapan oleh Biro Hukum kepada unit kerja eselon II di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan nota dinas Kepala Biro Hukum Nomor 428/SJ.4/HK.160/III/2024 tanggal 7 Maret 2024, hal Permohonan Masukan/Tanggapan Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Pembinaan Kelompok dan Gabungan Kelompok Sektor Kelautan dan Perikanan	75%

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	PROGRES	CAPAIAN PROGRES
I.	PERATURAN MENTERI			
			b. Telah diselenggarakan rapat pembahasan pada tanggal 6 Mei 2024, berdasarkan undangan Kepala Biro Hukum atas nama Sekretaris Jenderal Nomor B.727/SJ.4/TU.330/V/2024, tanggal 3 Mei 2024, hal Undangan Rapat	
3.	Peraturan Menteri	Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia	Telah disampaikan permohonan harmonisasi melalui Surat Sekretaris Jenderal Nomor B.337/SJ/HK.160/III/2024, tanggal 26 Maret 2024	100%
4.	Peraturan Menteri	Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan	<p>a. Proses permintaan masukan/ tanggapan oleh Biro Hukum kepada unit kerja eselon II di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan nota dinas Kepala Biro Hukum Nomor 185/SJ.4/HK.160/I/2024 tanggal 24 Januari 2024, hal Permohonan Masukan/Tanggapan terhadap Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan</p> <p>b. Telah diselenggarakan rapat pembahasan pada tanggal 2 April 2024, berdasarkan undangan Kepala Biro Hukum atas nama Sekretaris Jenderal Nomor B.557/SJ.4/TU.330/III/2024, tanggal 25 Maret 2024, hal Undangan Rapat</p> <p>c. Telah dilaksanakan kaji lapang kepada Pelaku Usaha P2MKP Bening Jati Anugerah di Kabupaten Bogor pada tanggal 25 April 2024</p>	75%

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	PROGRES	CAPAIAN PROGRES
I.	PERATURAN MENTERI			
			<p>d. Telah dilaksanakan kaji lapang kepada Pelaku Usaha P2MKP Dejeefish di Sukabumi pada tanggal 8 Mei 2024</p> <p>e. Akan diselenggarakan rapat pembahasan pada tanggal 28 Juni 2024 dengan mengundang Kemnaker, P2MKP, dan Ketua Forkomnas P2MKP</p> <p>f. Akan disampaikan harmonisasi kepada Kemenkumham pada tanggal 28 Juni 2024</p>	
5.	Peraturan Menteri	Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	<p>a. Proses permintaan masukan/ tanggapan oleh Biro Hukum kepada unit kerja eselon II di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan nota dinas Kepala Biro Hukum Nomor 672/SJ.4/HK.160/IV/2024 tanggal 16 April 2024, hal Permohonan Masukan/Tanggapan terhadap Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pelatihan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan</p> <p>b. Telah diselenggarakan rapat pembahasan pada tanggal 14 Juni 2024, berdasarkan undangan Kepala Biro Hukum atas nama Sekretaris Jenderal Nomor B.941/SJ.4/TU.330/VI/2024, tanggal 11 Juni 2024, hal Undangan Rapat Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan</p>	75%

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	PROGRES	CAPAIAN PROGRES
I.	PERATURAN MENTERI			
			c. Rancangan Peraturan Menteri dimaksud dikembalikan kepada pemrakarsa untuk penyempurnaan materi, melalui nota dinas Kepala Biro Hukum, Nomor 1175/SJ.4/HK.160/VI/2024, tanggal 14 Juni 2024, hal Pengembalian Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	
II.	KEPUTUSAN MENTERI			
1.	-	-	-	-
Rata-rata capaian Prosun				80%


IKU Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan ini merupakan IKU dengan *output* kendali rendah dengan proses pencapaian IKU ini dipengaruhi secara dominan oleh satuan kerja di luar Sekretariat BPPSDM. Oleh karena itu diperlukan komitmen dari pimpinan dan kontribusi dari pegawai yang terlibat dalam tahapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan yang berkontribusi penting dalam pencapaian IKU ini antara lain: rapat-rapat koordinasi dalam rangka pembahasan peraturan, pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas antara Sekretariat dan Pusat serta kegiatan advokasi dan asistensi yang dilakukan oleh Biro Hukum Sekretariat Jenderal KKP.

INDIKATOR KINERJA 16

Nilai PNBP BPPSDM (Rupiah Milyar)

Menurut UU no. 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor



Kelautan dan Perikanan adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara dari sektor kelautan dan perikanan.

Periode pengukuran capaian IKU adalah tahunan dengan polarisasi maximize. Persentase Realisasi PNBPN BPPSDM dapat di monitor melalui aplikasi OM SPAN. Rincian realisasi pada aplikasi OM SPAN sebagai berikut:

1. Penerimaan Fungsional berupa pendapatan penjualan hasil pertanian perkebunan peternakan dan budidaya, pendapatan penjualan hasil produksi non litbang lainnya, pendapatan penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tusi, pendapatan pengujian, sertifikasi, kalibrasi dan standarisasi lainnya, pendapatan biaya pendidikan; pendapatan layanan pendidikan dan/atau pelatihan, Pendapatan royalty atas kekayaan intelektual, Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan;
2. Penerimaan umum berupa pendapatan sewa tanah, Gedung dan bangunan;
3. Penerimaan BLU berasal dari pendapatan jasa layanan pendidikan, pendapatan jasa pelayanan tenaga pekerjaan informasi pelatihan dan teknologi, pendapatan penyediaan barang, pendapatan jasa penyediaan barang dan jasa lainnya, pendapatan jasa layanan perbankan BLU, pendapatan lain-lain BLU, pendapatan BLU lainnya dari sewa ruangan, pendapatan BLU lainnya dari sewa peralatan dan mesin, pendapatan BLU lainnya dari sewa lainnya.

Target PNBPN BPPSDM Tahun 2024 adalah sebesar Rp32.134.003.000,00 dengan target penerimaan fungsional sebesar Rp13.683.964.000,00 dan target penerimaan umum sebesar Rp678.733.000,00 serta target BLU sebesar Rp17.771.306.000,00. Sesuai surat Plt Sekretariat BPPSDM An Kepala BPPSDM

nomor B.5411/BPPSDM.1/KU.340/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024 perihal Capaian PNBP Semester I Tahun 2024 , realisasi PNBP BPPSDM pada triwulan II sebesar Rp.21.832.409.485.- atau 67,94%.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam upaya pencapaian target IKU adalah:

1. Monitoring pelaksanaan Maksimum Pencairan (MP 1).
2. Pendampingan pengelolaan PNBP di satker Politeknik AUP Jakarta (Kampus Serang), SUPM Kota Agung, BRPBAPPP Maros, BPPP Bitung, dan Politeknik KP Bitung.
3. Pembahasan usulan perubahan jenis dan tarif PNBP PP 85 Tahun 2021

INDIKATOR KINERJA 17

Tenaga Kerja yang Terlibat Lingkup BPPSDM (orang)

Tenaga kerja yang terlibat dalam sektor kelautan dan perikanan merupakan setiap orang yang melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang/jasa maupun yang menerima manfaat/operasionalisasi dalam kegiatan prioritas fisik ataupun non fisik di sektor kelautan dan perikanan baik perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan, pemasaran produk perikanan, pengelolaan ruang laut, penyuluhan pelatihan serta karantina ikan. Capaian IKU ini diambil dari data Jumlah Penyuluh Perikanan Bantu, Jumlah Penyuluh Perikanan Swadaya, Jumlah Pengelola Usaha Mikro Kecil Menengah, dan Jumlah Pusat Pelatihan Mandiri KP dengan target sebesar 12.500 orang pada Tahun 2024. Periode pengukuran capaian IKU adalah tahunan dengan polarisasi *maximize*.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam upaya pencapaian IKU Tenaga kerja yang terlibat lingkup BPPSDM berupa pemantauan capaian kinerja Tenaga Kerja yang Terlibat Lingkup BPPSDM bersama Pusat Pelatihan KP dan Pusat Penyuluhan KP.

INDIKATOR KINERJA 18

Kerja Sama Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang Disepakati (Kesepakatan)


Kerja Sama Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang Disepakati (Kesepakatan) didefinisikan sebagai jumlah jejaring, kemitraan dan/ atau kerja sama BPPSDM yang terbentuk, disepakati, dan ditindaklanjuti pada tahun berjalan. Periode pengukuran IKU ini adalah triwulan dengan polarisasi *maximize*. Target yang ditetapkan pada Tahun 2024 adalah 47 kesepakatan.

Capaian IKU Kerja Sama Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang Disepakati (Kesepakatan) sebagai berikut:

Tabel 14. Capaian Kinerja Kerja Sama Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang Disepakati (Kesepakatan)

IKU-18. Kerja Sama Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang Disepakati (Kesepakatan)								
Realisasi Triwulan II			Triwulan II Tahun 2024			% Kenaikan Trw II 2023-2024	Reviu Renstra Sekretariat BPPSDM 2024	
2021-2023			Target	Realisasi	% Capaian		Target 2024	% Capaian thd target 2024
2021	2022	2023						
41	38	-	19	22	115,79	-	75	29,33

Capaian IKU Kerja Sama Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang Disepakati (Kesepakatan) triwulan II Tahun 2024 sebesar 22 kesepakatan dari target 19 kesepakatan atau 115,79%. Tidak bisa dibandingkan karena tidak ada capaian di triwulan II tahun 2023, sedangkan apabila dibandingkan dengan target Renstra sebesar 75 kesepakatan, baru mencapai 29,33%.



Faktor pendukung capaian IKU dikarenakan adanya upaya memperluas jejaring kerja sama dengan pihak pemerintah, institusi Pendidikan, NGO, serta DUDI.

Kegiatan yang dilakukan dalam mendukung capaian IKU, adalah :

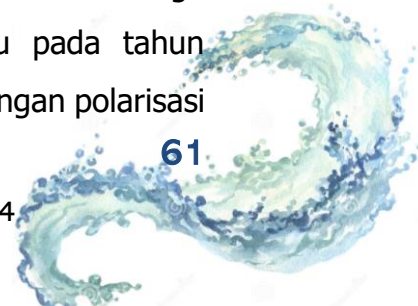
1. Fasilitasi telaah kerja sama lingkup BPPSDM meliputi satker pendidikan, pelatihan dan penyuluhan.
2. Menerima audiensi calon mitra kerja sama, yaitu :
 - a. Audiensi Kepala BPPSDM PT OS Selanjaya tentang Peningkatan Kapasitas dan Penyerapan Lulusan Pendidikan Kelautan dan Perikanan
 - b. Audiensi Kepala BPPSDM KP dengan Rare Indonesia tentang Pengelolaan Kolaboratif Perikanan Berkelanjutan Berbasis Ruang dan Tata Kelola (PAAP)
 - c. Audiensi Kepala BPPSDM dengan Kepala Dinas KP Kabupaten Bandung
 - d. Audiensi Kepala BPPSDM USAID-NOAA
 - e. Audiensi Kepala BPPSDM dengan Universitas Maritim Raja Ali Haji UMRAH
 - f. Audiensi Kepala BPPSDM dengan JICA Indonesia
 - g. Audiensi Kepala BPPSDM dengan Chief SEAFDEC tentang Pembahasan Laporan Hasil Kegiatan SEAFDEC 2023 dan Rencana Kegiatan Tahun 2024
 - h. Audiensi Kepala BPPSDM dengan JKPP (Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif)
 - i. Audiensi Kepala BPPSPDM dengan UNDP terkait *Implementation of the Arafura and Timor Seas Regional and National Strategic Action Programs (ATSEA-2); Second Phase of the Arafura Timor Seas Ecosystem Action (ATSEA)*
 - j. Audiensi antara Ses.BPPSDM dengan Univ. Negeri Gorontalo Tridarma Perguruan Tinggi.

- 
- k. Audiensi Setmenlu Rencana kegiatan *capacity building dan business matching*
 - l. Audiensi BPPSDM dengan Dr. Hide Sakaguchi – President of Ocean Policy Research Institute (OPRI) Sasakawa Peace Foundation
 - m. Audiensi Kepala BPPSDM Menerima Audiensi Tim Survei dari Kantor Pusat JICA
 - n. Audiensi Kepala BPPSDM dengan Tim Michigan State University bersama dengan Tim Politeknik Ahli Usaha Perikanan
 - o. Audiensi Kepala BPPSDM Menerima Audiensi HIMITEKINDO
 - p. Audiensi Kepala BPPSDM dengan JICA HQ tentang *Survey Project Indonesia – Japan Circulation of Human Resources in Blue Economy*
 - q. Audiensi Kepala BPPSDM dengan JICA HQ tentang finalisasi *MoM Indonesia – Japan Circulation of Human Resources in Blue Economy*
3. Monitoring pelaksanaan kerja sama rutin per Triwulan.
 4. Kunjungan lapangan ke beberapa mitra kerja sama.
 5. Koordinasi pelaksanaan pelatihan internasional untuk 8 negara Afrika (KSST) bersama Pemprov Bali, Pusat Pelatihan KP, BPPP Banyuwangi, LRPT Denpasar.

INDIKATOR KINERJA 19

Persentase Tindak Lanjut Kerja Sama Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang telah Disepakati (%)

IKU Persentase Tindak Lanjut Kerja Sama Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang telah Disepakati merupakan rasio implementasi kerja sama riset dan sumber daya manusia kelautan dan perikanan dengan jumlah dokumen kerja sama antar lembaga dan internasional yang telah disepakati dan masih berlaku pada tahun sebelumnya. Pengukuran capaian IKU ini dilakukan Tahunan dengan polarisasi



maximize. Progres capaian tindak lanjut kerja sama sampai dengan Triwulan II sebesar 78,03% dari target tahunan 73%.

Kegiatan pendukung capaian IKU yaitu melakukan input progress dan perhitungan capaian sementara untuk IKU tindak lanjut kerja sama bersama Pusat dan UPT.

INDIKATOR KINERJA 20


Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Sekretariat BPPSDM (%)

Layanan dukungan manajemen internal Sekretariat BPPSDM terdiri dari 12 layanan yang meliputi: (1). Pelayanan perencanaan dan penganggaran internal, (2). Pelayanan Monitoring dan Evaluasi Riset dan SDM KP; (3). Pelayanan Pelaporan Kinerja Riset dan SDM KP; (4). Pelayanan Keuangan Riset dan SDM KP; (5). Pelayanan Pengelolaan BMN Riset dan SDM KP; (6). Pelayanan Tata Usaha dan Kerumahtanggaan Riset dan SDM KP; (7). Pelayanan Kerjasama Riset dan SDM KP; (8). Pelayanan Kehumasan Riset dan SDM KP; (9). Pelayanan Data Riset dan SDM KP; (10). Pelayanan Perencanaan dan Pengembangan SDMA Riset; (11). Pelayanan Jabatan Fungsional Riset dan SDM KP; (12). Pelayanan Hukum dan Organisasi. Pengukuran IKU ini dilakukan setiap Triwulanan dengan polarisasi *maximize*.

Capaian IKU Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Sekretariat BPPSDM (%) sebagai berikut:

Tabel 15. Capaian Kinerja Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Sekretariat BPPSDM (%)

IKU-20. Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Sekretariat BPPSDM (%)								
Realisasi Triwulan II			Triwulan II Tahun 2024			% Kenaikan Trw II 2023-2024	Reviu Renstra Sekretariat BPPSDM 2024	
2021-2023			Target	Realisasi	% Capaian		Target 2024	% Capaian thd target 2024
2021	2022	2023						
100	100	100	100	100	100	-	-	-



Capaian IKU Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Sekretariat BPPSDM (%) triwulan II Tahun 2024 sebesar 100 % dari target 100%. Jika dibandingkan dengan capaian triwulan II tahun 2023, tidak terjadi peningkatan. IKU ini tidak tercantum dalam Renstra sehingga tidak dapat dibandingkan dengan target Renstra. Rincian capaian IKU Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Sekretariat BPPSDM (%) pada lampiran 2.

Keberhasilan tercapainya indikator kinerja persentase layanan dukungan manajemen internal Sekretariat BPPSDM, antara lain disebabkan oleh:


1. Komunikasi yang baik dan rutin dengan unit kerja lingkup BPPSDM;
2. Pelaksanaan kegiatan dengan mengacu pada ROK yang telah ditetapkan
3. Komitmen penanggung jawab kegiatan terhadap tugas dan tanggung jawab dalam bentuk ketersediaan dokumen output pelaksanaan kegiatan.

Kegiatan yang mendukung pencapaian IKU meliputi 12 layanan dukungan manajemen mulai dari pelayanan perencanaan dan penganggaran internal sampai dengan pelayanan hukum dan organisasi riset dan SDM KP yang didukung oleh ketersediaan anggaran.

INDIKATOR KINERJA 21

Persentase Permasalahan Hukum di Lingkungan BPPSDM yang Ditangani (%)

IKU ini didefinisikan sebagai jumlah permasalahan hukum yang di advokasi dan di tangani oleh Sekretariat BPPSDM yang berkaitan dengan kepentingan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan berdasarkan Peraturan Menteri KP Nomor 15 Tahun 2002 tentang Advokasi Hukum di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sampai dengan akhir tahun 2023. Kegiatan advokasi hukum diperoleh dari prosentase perhitungan jumlah permasalahan hukum berupa kegiatan konsultasi hukum, pendampingan hukum, dan penyelesaian perkara hukum yang ditangani dibandingkan dengan permasalahan hukum yang dimintakan/dimohonkan



untuk advokasi baik kepada unit kerja lingkup BPPSDM maupun kepada seluruh pegawai aktif maupun yang telah purna tugas.

Pada Triwulan II 2024, telah disampaikan Nota Dinas Plt Sekretaris BPPSDM nomor 1559/BPPSDM.1/TU.210/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024, untuk pembaruan/update penanganan permasalahan hukum di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia KP dalam rangka optimalisasi dan mitigasi penanganan permasalahan hukum di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hal ini menindaklanjuti Nota Dinas Kepala Biro Hukum nomor 1019/SJ.4/TU.210/V/2024. Periode pengukuran IKU ini yaitu Tahunan dengan polarisasi *maximize*.

INDIKATOR KINERJA 22

Nilai Keterbukaan Informasi Publik BPPSDM (Nilai)

Indikator Kinerja Utama Nilai Keterbukaan Informasi Publik BPPSDM (Nilai) merupakan Indikator pengukuran seberapa informatif sebuah organisasi. Keterbukaan informasi publik adalah prinsip yang mendorong pemerintah untuk menyediakan akses terbuka dan transparan terhadap informasi publik kepada masyarakat. Prinsip ini diyakini dapat meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik. Periode pengukuran capaian IKU ini dilakukan Tahunan dengan polarisasi *maximize*.

Kegiatan yang dilakukan dalam mendukung capaian IKU antara lain :

1. Rapat Penyusunan *Self Assesment Questionnaire* (SAQ) dan persiapan Monitoring dan Evaluasi PPID; lingkup BPPSDM TA 2024 4-5 April 2024 diikuti oleh BHKLN, Eselon 2 lingkup BPPSDM, Tim PPID BPPSDM.
2. Rapat Teknis Asistensi PPID 2024 diikuti oleh BHKLN, Tim PPID BPPSDM dan Eselon 2 lingkup BPPSDM pada 7 Mei 2024.
1. Pendampingan dan Asistensi SAQ PPID lingkup BPPSDM diikuti oleh BHKLN, Tim PPID BPPSDM dan UPT lingkup BPPSDM, 13-21 Mei 2024.

INDIKATOR KINERJA 23

Indeks Perencanaan Program (Indeks)

Indeks Perencanaan Program merupakan salah satu komponen perencanaan program dan anggaran lingkup BPPSDM dengan bobot 80%. Perhitungan indeks ini dilakukan oleh Sekretariat BPPSDM melalui lembar Kerja Evaluasi (LKE) dengan komponen penilaian sebagai berikut: (1). Integrasi, yaitu Penyelarasan Reviu Renstra 2024 dengan Renja BPPSDM 2024, antara volume dan satuan indikator yang tertuang dalam dokumen Reviu Renstra 2024 dengan dokumen Renja 2024 sebagai perbaikan dalam penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja 2024; (2). Singkronisasi, yaitu Penyelarasan Renja 2025 dengan RKAKL 2025, antara volume, uan, serta pagu pada setiap kegiatan dalam dokumen Renja hasil TM pada Pagu Definitif dengan dokumen RKAKL Pagu Definitif; (3). Keterhubungan Perencanaan Kinerja, yaitu Penyelarasan Renja 2024 dengan Perjanjian Kinerja 2024, antara volume dan satuan yang tertuang dalam dokumen Renja 2024 dengan Perjanjian Kinerja 2024 di tahun berjalan, serta menyelaraskan antara volume dan satuan yang tertuang dalam dokumen Renja 2025 dengan Perjanjian Kinerja 2025. Periode pengukuran capaian IKU ini dilakukan Tahunan dengan polarisasi *maximize*.

INDIKATOR KINERJA 24

Indeks Perencanaan Anggaran (Indeks)

Indeks Perencanaan Anggaran merupakan salah satu komponen revisi anggaran di tahun berjalan lingkup BPPSDM dengan bobot 80%. Capaian Indeks Perencanaan Anggaran Triwulan II mengalami perubahan perhitungan dengan penyesuaian tusi yang baru dalam proses pengajuan revisi RPD Halaman III DIPA, dimana perhitungan Indeks Perencanaan Anggaran yang baru dilakukan melalui lembar kerja evaluasi dengan komponen penilaian sebagai berikut :

1. Persentase Penyelesaian Revisi RKAKL Unit BPPSDM 2024 merupakan perbandingan antara jumlah SPRA yang diterima dalam proses revisi Direktorat Jenderal Anggaran dan/atau Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan jumlah pengajuan revisi yang dibuktikan dengan



surat pengajuan revisi Eselon I ke Direktorat Jenderal Anggaran dan/atau Direktorat Jenderal Perbendaharaan


2. Persentase Kepatuhan pengajuan Usulan Pemutakhiran/Revisi Rencana Penarikan Dana (RPD) halaman III DIPA 2024 dari UPT lingkup BPPSDM kepada sekretariat BPPSDM mengukur ketepatan waktu pengajuan usulan Pemutakhiran/Revisi Rencana Penarikan Dana (RPD) halaman III DIPA 2024 sesuai Nota Dinas Direktur Pelaksanaan Anggaran nomor ND454/PB.2/2024 tanggal 22 April 2024 hal Pemutakhiran Rencana Penarikan Dana (RPD) Halaman III DIPA TA 2024. Tanggal (Batas Pengajuan Target Penarikan dana Halaman 3 DIPA : TW I (2 Februari), TW II (14 April), TW III (14 Juli), TW IV (14 Oktober). Kepatuhan pengajuan Usulan RPD Halaman III DIPA 2024 dapat diakses melalui aplikasi <https://sakti.kemenkeu.go.id/>.

Pengukuran IKU ini dilakukan setiap Triwulan dengan polarisasi maximize. Capaian IKU Indeks Perencanaan Anggaran (Indeks), pada tabel berikut :

Tabel 16. Capaian Kinerja Indeks Perencanaan Anggaran (Indeks)

IKU-24. Indeks Perencanaan Anggaran (Indeks)								
Realisasi Triwulan I			Triwulan I Tahun 2024			% Kenaikan Trw II 2022-2023	Reviu Renstra Sekretariat BPPSDM 2024	
2021-2023			Target	Realisasi	% Capaian		Target 2024	% Capaian thd target 2024
2021	2022	2023						
-	-	-	80	80,13	100,16	-	-	-

Capaian Indeks Perencanaan Anggaran pada Triwulan II yaitu 80,13 dari target yang ditetapkan sebesar 80% dengan persentase capaian sebesar 100,16%. Indeks pencapaian anggaran diperoleh dari hasil perhitungan rata-rata dari Persentase penyelesaian revisi RKAKL unit BPPSDM tercapai 100%, dan persentase kepatuhan penyelesaian Rencana Penarikan Dana halaman III DIPA tercapai 60,26%. Hasil capaian indeks perencanaan anggaran sesuai dengan memo Ketua Tim Kerja Program perihal penyampaian capaian indeks



perencanaan anggaran TW II kepada Sekretaris BPPSDM Nomor 1812/BPPSDM.1/RC.610/VII/2024. IKU ini merupakan IKU baru sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun lalu dan dengan target Renstra.

Keberhasilan tercapainya indikator indeks perencanaan anggaran disebabkan oleh: (1). Komunikasi dan koordinasi yang baik dengan unit kerja internal maupun eksternal (Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Pelaksana Anggaran, Kementerian Keuangan); (2). Ketepatan dalam pelayanan revisi anggaran kepada satker lingkup BPPSDM.

Kelemahan pada pencapaian indikator ini adalah, belum seluruh satker patuh terhadap revisi pengajuan RPD Halaman III DIPA, sehingga diperlukan komunikasi yang lebih intens kembali untuk mengingatkan kepada seluruh satker untuk melakukan pengajuan revisi PRD Halaman III DIPA.

Upaya yang dilakukan agar seluruh satker menyampaikan revisi pengajuan RPD Halaman III DIPA tepat waktu adalah dengan selalu mengingatkan kepada satker lingkup BPPSDM setiap triwulannya melalui Surat Dinas Kepala BPPSDM sesuai dengan tenggat waktu batas pengajuan target RPD Halaman 3 DIPA yang telah ditetapkan Kementerian Keuangan.

INDIKATOR KINERJA 25

Indeks Perencanaan Strategis dan Lintas Sektor (Nilai)

Perencanaan Strategis merupakan perencanaan dalam penyusunan dokumen kebijakan dan / atau strategis di Lingkungan BPPSDM yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan selama 5 (lima) tahun. Perencanaan Lintas Sektor merupakan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dan program kegiatan yang terpadu dan bersifat lintas sektor dengan memperlihatkan karakteristik di setiap wilayah sesuai dengan Perpres 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020 - 2024. BPPSD mendukung perencanaan dan pelaksanaan program lintas sektor tersebut melalui kegiatan di bidang pelatihan, penyuluhan, dan pendidikan dalam pencapaian target-target nasional. Nilai Perencanaan Strategis dan Lintas sektor kelautan dan perikanan merupakan indikator keberhasilan perencanaan kegiatan lintas sektor bidang kelautan dan perikanan. Indikator ini

dihitung berdasarkan 3 (tiga) faktor yaitu: (1). Proses pembahasan (Nilai 30), (2). Penyelesaian dokumen (Nilai 40), dan (3). Penyampaian tepat waktu (Nilai 30).

Pengukuran IKU ini dilakukan tahunan dengan polarisasi *maximize*.

INDIKATOR KINERJA 26

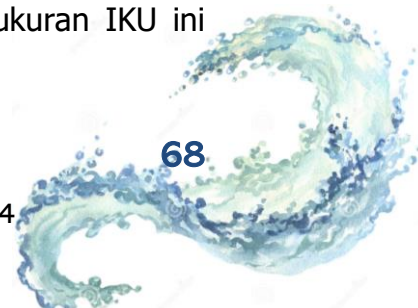
Indeks Pelayanan Publik (IPP) Lingkungan BPPSDM (Nilai Kualitas)

Indeks Pelayanan Publik merupakan suatu predikat yang diperoleh unit kerja yang memenuhi standar hasil perhitungan dan pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) untuk mengukur kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara mandiri. Aspek Penilaian yang menjadi indikator dalam perhitungan IPP dalam PEKPPP adalah: (1). Kebijaksanaan Pelayanan (24%) ;(2). Profesionalisme (25%) ;(3). Sarana Prasarana (18%); (4). Sistem Informasi Pelayanan Publik (10%); (5). Konsultasi Pengaduan (11%) dan (6) Inovasi (12%). Pengukuran IKU ini dilakukan tahunan dengan polarisasi *maximize*.

INDIKATOR KINERJA 27

Satuan Kerja yang diusulkan sebagai Satker Badan Layanan Umum /BLU (satker)

Konsep Pengelolaan Keuangan BLU tertuang dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan / atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Sekretariat BRSDM bersama Ditjen Perbendaharaan c.q. Direktorat PK BLU memberikan asistensi dan konsultasi serta pendampingan pembentukan satuan kerja BLU. Bimbingan teknis dilaksanakan dalam rangka penyusunan persyaratan administratif bagi satuan kerja yang akan mengajukan usulan menjadi satuan kerja yang menerapkan PK BLU. Pengukuran IKU ini dilakukan tahunan dengan polarisasi *maximize*.



INDIKATOR KINERJA 28

Nilai Pengawasan Kearsipan Sekretariat BPPSDM (Nilai)

Nilai pengawasan kearsipan unit kearsipan BPPSDM bertujuan untuk menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan.

Dasar hukum yang dipergunakan adalah Peraturan Arsip Nasional RI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan. Adapun nilai yang didapat, diperoleh dari 60 % pengawasan internal dan 40 % pengawasan eksternal. Hal-hal yang menjadi penilaian ANRI yaitu : (1). Pengawasan Internal: a.pengelolaan Arsip Dinamis yang meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip; dan b. Sumberdaya kearsipan yang meliputi sumber daya manusia kearsipan, dan prasarana dan sarana; (2). Pengawasan Eksternal :a.kebijakan; b. pembinaan; c.pengelolaan arsip dinamis yang meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip; f. Sumberdaya kearsipan yang meliputi sumberdaya manusia kearsipan, organisasi kearsipan, prasarana dan sarana serta pendanaan. Penghargaan yang ditandatangani Menteri KP. Kategori Hasil Pengawasan: Kategori Nilai Predikat yang tertinggi AA>90-100 Sangat Memuaskan, A>80-90 Memuaskan, BB>70-80 Sangat Baik, B>60-70 Baik, CC>50-60 Cukup, C>30-50 Kurang, D 0-30 Sangat Kurang. Pengukuran IKU ini dilakukan tahunan dengan polarisasi *maximize*. Kegiatan yang telah dilaksanakan berupa pendampingan kearsipan di lingkungan BPPSDM.

SASARAN KEGIATAN 2

Terpenuhinya Layanan Sarana dan Prasarana Internal Sekretariat BPPSDM

Pencapaian kinerja sasaran kegiatan "Terpenuhinya Layanan Sarana dan Prasarana Internal Sekretariat BPPSDM" didukung 1 (satu) indikator kinerja utama (IKU) yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran tersebut yaitu:

INDIKATOR KINERJA 29

Persentase pemenuhan layanan Sarana dan Prasarana Sekretariat BPPSDM (%)

Pemenuhan layanan sarana dan prasarana Sekretariat BPPSDM merupakan indikator yang menggambarkan peningkatan kapasitas sarana dan prasarana yang berbentuk pengadaan fisik/belanja modal yang dilaksanakan oleh satuan kerja Sekretariat BPPSDM. Sarana dan Prasarana yang memadai akan menunjang keberhasilan pelaksanaan program sehingga diperlukan komitmen untuk memenuhi seluruh kebutuhan sarana dan prasarana yang termaktub pada Rencana Umum Pengadaan (RUP). Periode pengukuran capaian IKU ini adalah Tahunan dengan polarisasi *maximize*.

SASARAN KEGIATAN 3

Terpenuhinya Layanan Perkantoran Sekretariat BPPSDM

Pencapaian kinerja sasaran kegiatan "Terpenuhinya Layanan Perkantoran Sekretariat BPPSDM" didukung 2 (dua) indikator kinerja utama (IKU) yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran tersebut yaitu :

INDIKATOR KINERJA 30

Persentase Pemenuhan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Sekretariat BPPSDM tepat waktu (%)

Indikator ini menunjukkan tingkat pelayanan kesekretariatan terhadap pemenuhan hak pegawai. Formulasi yang digunakan untuk penghitungan IKU ini adalah pembayaran gaji dan tunjangan kinerja pegawai Sekretariat BPPSDM, Pusat Pendidikan KP, Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP yang dibayarkan tepat waktu. Kategori tepat waktu diimplementasikan dalam bentuk pembayaran gaji yang dilaksanakan pada tanggal pertama hari kerja bulan berjalan. Sementara untuk pembayaran tunjangan kinerja dilaksanakan sebelum tanggal 15 bulan berikutnya. Periode pengukuran IKU ini adalah triwulanan dengan polarisasi *maximize*.

Tabel 17. Capaian Kinerja Persentase Pemenuhan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Sekretariat BPPSDM tepat waktu (%)

IKU-30. Persentase Pemenuhan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Sekretariat BPPSDM tepat waktu (%)								
Realisasi Triwulan II			Triwulan II Tahun 2024			% Kenaikan Trw II 2022-2023	Reviu Renstra Sekretariat BPPSDM 2024	
2020-2022			Target	Realisasi	% Capaian		Target 2024	% Capaian thd target 2024
2021	2022	2023						
-	100	100	100	100	100	-	-	-

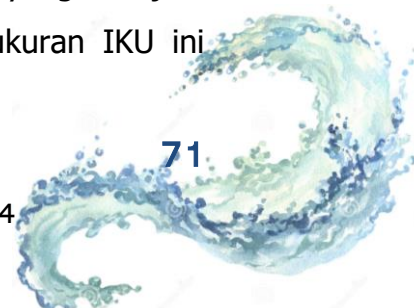
Realisasi pada IKU ini mencapai 100% dari target. Jika dibandingkan dengan capaian triwulan II Tahun 2023, tidak terdapat perubahan pada realisasi tersebut. IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan target Renstra. Pencapaian IKU ini tidak terlepas dari koordinasi yang baik antara tim keuangan dengan tim kepegawaian terkait pemutakhiran data pegawai. Dukungan eksternal melalui koordinasi intensif dengan tim KPPN terkait penggunaan aplikasi GPP, Tunjangan kinerja dan aplikasi SAKTI juga berpengaruh terhadap ketercapaian IKU.

Kegiatan yang mendukung pencapaian IKU ini antara lain: pemantauan rutin oleh tim kepegawaian terhadap dokumentasi presensi masing-masing pegawai yang dijadikan dasar dalam pemberian besaran Gaji dan Tunjangan Kinerja oleh TIMJA keuangan Sekretariat BPPSDM.

INDIKATOR KINERJA 31

Persentase Pemenuhan Layanan Perkantoran Sekretariat BPPSDM tepat waktu (%)

Kegiatan layanan perkantoran dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan operasional sehari-hari perkantoran, penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran serta pelaksanaan tugas Pimpinan. Kegiatan tersebut perlu di dokumentasikan menjadi Laporan Bulanan yang menjadi dasar pengambilan keputusan bagi pimpinan. Periode pengukuran IKU ini adalah Triwulanan dengan polarisasi *maximize*.



Tabel 18. Capaian Kinerja Persentase Pemenuhan Layanan Perkantoran Sekretariat BPPSDM tepat waktu (%)

IKU-32. Persentase Pemenuhan Layanan Perkantoran Sekretariat BPPSDM tepat waktu (%)								
Realisasi Triwulan II			Triwulan II Tahun 2024			% Kenaikan Trw II 2022-2023	Reviu Renstra Sekretariat BPPSDM 2024	
2020-2022			Target	Realisasi	% Capaian		Target 2024	% Capaian thd target 2024
2021	2022	2023						
-	100	100	100	100	100	-	-	-

Realisasi pada capaian kinerja IKU ini sebesar 100% dari target 100% atau 100% dari target yang ditetapkan. Capaian IKU pemenuhan layanan perkantoran lingkup Sekretariat BPPSDM pada triwulan II didukung oleh 3 (tiga) laporan layanan perkantoran, yang terdiri dari :

1. Laporan kegiatan layanan perkantoran bulan April 2024 meliputi pembayaran operasional dan pemeliharaan perkantoran.
2. Laporan kegiatan layanan perkantoran bulan Mei 2024 meliputi pembayaran operasional dan pemeliharaan perkantoran.
3. Laporan kegiatan layanan perkantoran bulan Juni 2024 meliputi pembayaran operasional dan pemeliharaan perkantoran.

Faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian target IKU ini antara lain:

1. Pembayaran operasional perkantoran tepat waktu.
2. Pemeliharaan perkantoran tepat waktu sesuai target.
3. Monitoring rutin dan koordinasi dengan verifikator keuangan terkait keabsahan kuitansi.
4. Koordinasi antara penanggungjawab dengan pelaksana kegiatan secara rutin.

Kegiatan pendukung capaian IKU, meliputi kegiatan operasional sehari-hari perkantoran, penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran serta pelaksanaan tugas Pimpinan.



3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Berdasarkan rekapitulasi data OM SPAN sampai dengan tanggal 31 Juni 2024, pagu anggaran Sekretariat BPPSDM Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 62.175.000.000,-, dengan anggaran blokir sebesar Rp. 10.400.000.000,- sehingga pagu bersih Sekretariat BPPSDM sebesar Rp.51.775.000.000,-. Realisasi anggaran Sekretariat BPPSDM sebesar Rp. 23.006.126.375,- atau sebesar 37,00 % dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 19. Realisasi Anggaran Sekretariat BPPSDM Triwulan II Tahun 2024


PAGU SEKRETARIAT							
Jenis Belanja		Pagu	Blokir	Pagu Bersih	Realisasi	%	Sisa
51	Belanja Pegawai	12.100.000.000	-	12.100.000.000	6.356.488.477	52,53%	5.743.511.523
52	Belanja Barang Non Ops	24.500.000.000	8.900.000.000	15.600.000.000	8.344.803.140	34,06%	7.255.196.860
52 OPS	Belanja Barang Ops	23.175.000.000	-	23.175.000.000	8.040.092.958	34,69%	15.134.907.042
53	Belanja Modal	2.400.000.000	1.500.000.000	900.000.000	264.741.800	11,03%	635.258.200
Total		62.175.000.000	10.400.000.000	51.775.000.000	23.006.126.375	37,00%	28.768.873.625

Sumber: OMSPAN Kemenkeu, 31 Juni 2024

Secara umum anggaran Sekretariat BPPSDM pada triwulan II dapat dimanfaatkan cukup baik dengan realisasi anggaran mencapai 37,00 %. Realisasi anggaran per IKU lingkup Sekretariat BPPSDM Triwulan II tahun 2024, sebagaimana pada lampiran 3.

Dalam pelaksanaan anggaran Triwulan II tahun 2024, beberapa hal perlu mendapatkan perhatian yang merupakan kondisi yang mempengaruhi penyerapan anggaran, antara lain adanya keterlambatan ataupun kesalahan dalam penyiapan dokumen pertanggung-jawaban pelaksanaan kegiatan menghambat proses pembayaran.

Secara umum kinerja Sekretariat BPPSDM Triwulan II Tahun 2024 telah tercapai dengan baik, namun dalam pelaksanaannya direkomendasikan demi peningkatan kinerja dan pelaksanaan anggaran diperlukan implementasi



pelaksanaan operasional dan pemeliharaan kantor yang bersifat prioritas dilakukan sesuai perencanaan anggaran.

3.4. EFISIENSI ANGGARAN DAN SEKRETARIAT BPPSDM

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga disebutkan bahwa evaluasi kinerja anggaran terdiri atas evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi, evaluasi kinerja anggaran atas aspek manfaat dan evaluasi kinerja atas aspek konteks. Efisiensi terdiri atas efisiensi keluaran (output) Program untuk evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi tingkat unit Eselon I/program dan efisiensi keluaran (output) kegiatan untuk evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi tingkat satuan kerja/kegiatan.

Dalam rangka Laporan Kinerja BPPSDM s.d Triwulan IV Tahun 2023 penghitungan efisiensi data yang dibutuhkan untuk mengukur efisiensi keluaran program dan efisiensi keluaran output kegiatan meliputi: data capaian keluaran program, data capaian keluaran kegiatan, pagu anggaran dan realisasi anggaran. Efisiensi dihitung dengan cara membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan pengeluaran sebenarnya dengan pengeluaran seharusnya.

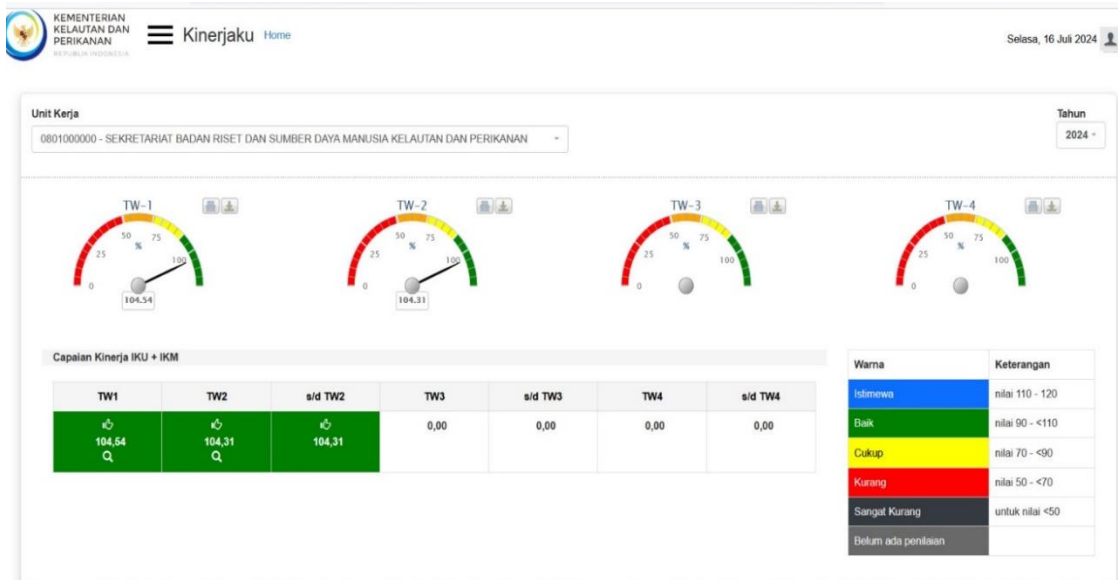
Untuk meningkatkan nilai efisiensi perlu adanya pengendalian serta peningkatan ketertiban pegawai dalam implementasi penggunaan dana sesuai rencana, dan atau memperbaharui rencana penggunaan dana apabila terjadi penyesuaian nilai dan waktu penyerapan sehingga realisasi yang direncanakan dengan realisasi sebenarnya bertaut positif yang berpengaruh terhadap peningkatan nilai efisiensi anggaran.

BAB IV. PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Sekretariat BPPSDM pada triwulan II Tahun 2024, memiliki 3 (tiga) sasaran kegiatan yang meliputi Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen BPPSDM, Terpenuhinya Layanan Sarana dan Prasarana Internal Sekretariat BPPSDM dan Terpenuhinya Layanan Perkantoran Sekretariat BPPSDM. Sasaran kegiatan tersebut diturunkan menjadi 31 (tiga puluh satu) Indikator Kinerja (IK) yang setiap IK didukung oleh anggaran yang proporsional.

Berdasarkan nilai NKO Triwulan II, Sekretariat BPPSDM mendapatkan nilai 104,31 dengan predikat baik, dimana terdapat 7 IKU berkinerja baik dan 4 IKU berkinerja Istimewa, sebagaimana dashboard kinerja sebagai berikut:



Adapun rincian NKO pada masing-masing IKU disajikan pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 20. Capaian Kinerja Sekretariat BPPSDM Triwulan II Tahun 2024

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET TAHUNAN 2024	Triwulan II		
				Target	Capaian	%
1 Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen BPPSDM	1	Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Lingkungan BPPSDM (unit)	17	15	15	100
	2	Unit kerja yang dibangun untuk diusulkan menuju WBK Lingkungan BPPSDM (unit/Satker)	8			
	3	Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK BPPSDM (%)	≤0,5			
	4	Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat BPPSDM (indeks)	85	79,25	82,32	103,87
	5	Penilaian Mandiri SAKIP BPPSDM (nilai)	81			
	6	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Sekretariat BPPSDM (Nilai)	94			
	7	Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPPSDM (nilai)	3,3			
	8	Persentase Unit kerja Sekretariat BPPSDM yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	94	94	113,89	120
	9	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Sekretariat BPPSDM (%)	82	82	93,22	113,68
	10	Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik BPPSDM (%)	76			
	11	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Sekretariat BRSDM (nilai)	93,76	83	86,77	104,54
	12	Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat BPPSDM (nilai)	82			
	13	Tingkat Kepatuhan BMN BPPSDM (%)	80			
	14	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BPPSDM (%)	80			
	15	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan BPPSDM (%)	100	60	80	120
	16	Nilai PNPB Satker BLU dan non BLU BPPSDM (Rupiah Miliar)	32,134			
	17	Tenaga Kerja yang Terlibat Lingkup BPPSDM (orang)	12.500			

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN 2024	Triwulan II				
			Target	Capaian	%		
	18	Kerja Sama Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang Disepakati (Kesepakatan)	47	19	22	115,79	
	19	Persentase Tindak Lanjut Kerja Sama Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang Disepakati (%)	73				
	20	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Sekretariat BPPSDM (%)	100	100	100	100	
	21	Persentase Permasalahan Hukum di Lingkungan BPPSDM yang Ditangani (%)	100				
	22	Nilai Keterbukaan Informasi Publik BPPSDM (Nilai)	91				
	23	Indeks Perencanaan Program (Indeks)	80				
	24	Indeks Perencanaan Anggaran (Indeks)	80	80	80,13	100,16	
	25	Nilai Perencanaan Strategis dan Lintas Sektor (Nilai)	80				
	26	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Lingkungan BPPSDM (Nilai Kualitas)	3,5				
	27	Satuan kerja yang diusulkan sebagai satker Badan Layanan Umum / BLU (satker)	1				
	28	Nilai Pengawasan Kearsipan Sekretariat BPPSDM	90				
2	Terpenuhinya Layanan Sarana dan Prasarana Internal Sekretariat BPPSDM	29	Persentase pemenuhan layanan Sarana dan Prasarana Sekretariat BPPSDM (%)	100			
3	Terpenuhinya Layanan Perkantoran Sekretariat BPPSDM	30	Persentase Pemenuhan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Sekretariat BPPSDM tepat waktu (%)	100	100	100	100
		31	Persentase Pemenuhan Layanan Perkantoran Sekretariat BPPSDM tepat waktu (%)	100	100	100	100



4.2. REKOMENDASI

Secara umum kinerja Sekretariat BPPSDM Pada triwulan II tahun 2024 menunjukkan kinerja yang baik, hal ini ditunjukkan dengan peroleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 104,31 atau di atas 100.

Berkenaan dengan kondisi-kondisi tersebut, maka diperlukan perhatian terhadap hal-hal sebagai berikut:

Capaian Kinerja Dipertahankan dalam rangka mendukung terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta mendorong pencapaian reformasi birokrasi melalui pencapaian target-target kinerja, maka pemantauan dan pengukuran kinerja perlu dilakukan secara sistematis dan berkala dalam rangka memitigasi indikator-indikator yang mengalami hambatan-hambatan dalam pencapaian kinerja. Disamping itu, bukti dukung capaian kinerja perlu dipersiapkan dengan baik sebagai wujud akuntabilitas atas pelaporan kinerja yang disajikan.

Seluruh Indikator kinerja perlu dilakukan pengawalan dengan baik guna memastikan bahwa capaian akhir tahun dapat memenuhi target yang telah ditetapkan.

LAMPIRAN

Lampiran 1.



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMAN www.kkp.go.id SUREL brsdm@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Rudi Alek Wahyudin**

Jabatan : Sekretaris Badan Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **I Nyoman Radiarta**

Jabatan : Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 27 Desember 2023

Pihak Kedua
Kepala Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kelautan dan Perikanan


I Nyoman Radiarta ✓

Pihak Pertama
Sekretaris Badan Riset dan
SDM Kelautan dan Perikanan


Rudi Alek Wahyudin ✓

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KP**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen BRSDM	1	Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Lingkungan BPPSDM (unit)	17
		2	Unit kerja yang dibangun untuk diusulkan menuju WBK lingkungan BPPSDM (unit/Satker)	8
		3	Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK BPPSDM (%)	≤0,5
		4	Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat BRSDM (indeks)	85
		5	Penilaian Mandiri SAKIP BPPSDM (nilai)	81
		6	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Sekretariat BRSDM (Nilai)	94
		7	Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPPSDM (nilai)	3,3
		8	Persentase Unit kerja Sekretariat BRSDM yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	94
		9	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Sekretariat BRSDM (%)	82
		10	Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik BPPSDM (%)	76
		11	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Sekretariat BRSDM (nilai)	93,76
		12	Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat BRSDM (nilai)	82
		13	Tingkat Kepatuhan BMN BPPSDM (%)	80
		14	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BPPSDM (%)	80
		15	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan BPPSDM (%)	100



SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
		16	Nilai PNBPN BPPSDM (Rupiah Miliar)	32,134
		17	Tenaga Kerja yang Terlibat Lingkup BPPSDM (orang)	12.500
		18	Kerja Sama Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang Disepakati (Kesepakatan)	47
		19	Persentase Tindak Lanjut Kerja Sama Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang telah Disepakati (%)	73
		20	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Sekretariat BRSDM (%)	100
		21	Persentase Pemmasalahan Hukum di Lingkungan BPPSDM yang Ditangani (%)	100
		22	Nilai Keterbukaan Informasi Publik BPPSDM (Nilai)	91
		23	Indeks Perencanaan Program (Indeks)	80
		24	Indeks Perencanaan Anggaran (Indeks)	80
		25	Nilai Perencanaan Strategis dan Lintas Sektor (Nilai)	80
		26	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Lingkungan BPPSDM (Nilai Kualitas)	3,5
		27	Satuan kerja yang diusulkan sebagai satker Badan Layanan Umum /BLU (satker)	1
		28	Nilai Pengawasan Kearsipan Sekretariat BRSDM	90
2	Terpenuhinya Layanan Sarana dan Prasarana Internal Sekretariat BRSDM	29	Persentase pemenuhan layanan Sarana dan Prasarana Sekretariat BRSDM (%)	100
3	Terpenuhinya Layanan Perkantoran Sekretariat BRSDM	30	Persentase Pemenuhan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Sekretariat BRSDM tepat waktu (%)	100
		31	Persentase Pemenuhan Layanan Perkantoran Sekretariat BRSDM tepat waktu (%)	100

Data Anggaran

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat BRSDM	62.500.000.000
Total Anggaran Sekretariat Badan Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan Tahun 2024		62.500.000.000

Jakarta, 27 Desember 2023

Pihak Kedua
Kepala Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kelautan dan Perikanan



I Nyoman Radiarta

Pihak Pertama
Sekretaris Badan Riset dan SDM
Kelautan dan Perikanan


Rudi Alek Wahyudin



Lampiran 2.



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMAM www.kkp.go.id SUREL bppsdm@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Rudi Alek Wahyudin**
Jabatan : Plt. Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Selanjutnya disebut pihak pertama



Nama : **I Nyoman Radiarta**
Jabatan : Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 April 2024

<p>Pihak Kedua Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan</p>  <p>I Nyoman Radiarta</p>	<p>Pihak Pertama Plt. Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan</p>  <p>Rudi Alek Wahyudin</p>
--	---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen BPPSDM	1	Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Lingkungan BPPSDM (unit)	17
		2	Unit kerja yang dibangun untuk diusulkan menuju WBK lingkungan BPPSDM (unit/Satker)	8
		3	Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK BPPSDM (%)	≤0,5
		4	Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat BPPSDM (indeks)	85
		5	Penilaian Mandiri SAKIP BPPSDM (nilai)	81
		6	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Sekretariat BPPSDM (Nilai)	94
		7	Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPPSDM (nilai)	3,3
		8	Persentase Unit kerja Sekretariat BPPSDM yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	94
		9	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Sekretariat BPPSDM (%)	82
		10	Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik BPPSDM (%)	76
		11	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Sekretariat BPPSDM (nilai)	93,76
		12	Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat BPPSDM (nilai)	82
		13	Tingkat Kepatuhan BMN BPPSDM (%)	80
		14	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BPPSDM (%)	80
		15	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan BPPSDM (%)	100
		16	Nilai PNBPN Satker BLU dan non BLU BPPSDM (Rupiah Miliar) (Rupiah Miliar)	32,134
		17	Tenaga Kerja yang Terlibat Lingkup BPPSDM (orang)	12.500



SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	
	18 Kerja Sama Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang Disepakati (Kesepakatan)	47	
	19 Persentase Tindak Lanjut Kerja Sama Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang telah Disepakati (%)	73	
	20 Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Sekretariat BPPSDM (%)	100	
	21 Persentase Permasalahan Hukum di Lingkungan BPPSDM yang Ditangani (%)	100	
	22 Nilai Keterbukaan Informasi Publik BPPSDM (Nilai)	91	
	23 Indeks Perencanaan Program (Indeks)	80	
	24 Indeks Perencanaan Anggaran (Indeks)	80	
	25 Nilai Perencanaan Strategis dan Lintas Sektor (Nilai)	80	
	26 Indeks Pelayanan Publik (IPP) Lingkungan BPPSDM (Nilai Kualitas)	3,5	
	27 Satuan kerja yang diusulkan sebagai satker Badan Layanan Umum /BLU (satker)	1	
	28 Nilai Pengawasan Kearsipan Sekretariat BPPSDM	90	
	2 Terpenuhinya Layanan Sarana dan Prasarana Internal Sekretariat BPPSDM	29 Persentase pemenuhan layanan Sarana dan Prasarana Sekretariat BPPSDM (%)	100
	3 Terpenuhinya Layanan Perkantoran Sekretariat BPPSDM	30 Persentase Pemenuhan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Sekretariat BPPSDM tepat waktu (%)	100
	31 Persentase Pemenuhan Layanan Perkantoran Sekretariat BPPSDM tepat waktu (%)	100	

Data Anggaran

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat BPPSDM	62.500.000.000
2.	Loka Riset Sumber Daya Dan Kerentanan Pesisir	6.233.730.000
3.	Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan	4.523.513.000
4.	Balai Riset Perikanan Laut	5.571.946.000
5.	Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan	6.954.877.000
6.	Loka Riset Perikanan Tuna	6.612.506.000
7.	Balai Riset Budidaya Ikan Hias	11.729.974.000
8.	Balai Riset Pemuliaan Ikan	10.857.446.000
9.	Loka Riset Budidaya Rumput Laut	3.683.042.000
10.	Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan	4.581.931.000
Total Anggaran Lingkup Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Tahun 2024		123.248.965.000

Jakarta, 2 April 2024

Pihak Kedua
Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

I Nyoman Radiarta

Pihak Pertama
Plt. Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Rudi Alek Wahyudin



Lampiran 3.

**CAPAIAN IKU PERSENTASE LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL SEKRETARIAT
BRSDM TRIWULAN II TAHUN 2024**

No.	Jenis Pelayanan	Target Trw I	Realisasi Trw I	%	Target Trw II	Realisasi Trw II	%
1.	Pelayanan Program	4	4	100	2	2	100
	Laporan Koordinasi Diklat TA 2024						
	Laporan Rakernis BPPSDM 2024						
	Laporan Sidang Komisi IV dan KKP						
	Perubahan nomenklatur Eselon I dan satker BPPSDM						
	Laporan persetujuan usulan revisi pergeseran antar Kanwil						
	Usulan anggaran revisi buka blokir (kode 2)						
2	Pelayanan Monev Pelaporan	4	4	100	5	5	100
	Laporan Monev berbasis aplikasi						
	Laporan Monev kegiatan prioritas						
	Laporan evaluasi rencana aksi						
	Dokumen Pengukuran BPPSDM TW I TA 2024						
	Dokumen Pengukuran Sekretariat BPPSDM TW I TA 2024						
3	Pelayanan PNBPNP	3	3	100	3	3	100
	Laporan PNBPNP Januari						
	Laporan PNBPNP Februari						
	Laporan PNBPNP Maret						
	Laporan PNBPNP April						
	Laporan PNBPNP Mei						
	Laporan PNBPNP Juni						
4	Pelayanan BMN	2	2	100	2	2	100
	Laporan BMN BRSDM 2023 (unaudited)						
	Laporan BMN Set BRSDM 2023 (Unaudited)						
	Laporan BMN BRSDM 2023 (Audited)						
	Laporan BMN Set BRSDM 2023 (Audited)						
5	Pelayanan Keuangan	2	2	100	4	4	100
	LK Unaudited BPPSDM TA 2023						
	LK Unaudited Set BPPSDM TA 2023						
	LK Audited BPPSDM TA 2023						
	LK Audited Set BPPSDM TA 2023						
	LK Semester I BPPSDM TA 2024						
	LK Semester I Sekretariat BPPSDM TA 2024						

No.	Jenis Pelayanan	Target Trw I	Realisasi Trw I	%	Target Trw II	Realisasi Trw II	%
6	Pelayanan Hukum dan Advokasi Keputusan dan Peraturan Kepala BPPSDM	15	15	100	15	15	100
7	Pelayanan Kehumasan Data Berita online Laporan Konten Media Sosial Rekap siaran pers BPPSDM	3	3	100	3	3	100
8	Pelayanan data dan Infomasi Statistik Pengembangan SDM Laporan Pemutakhiran Data Triwulan II 2024	1	1	100	1	1	100
9	Pelayanan Kerjasama Laporan Telaahan Kerjasama	1	1	100	1	1	100
10	Pelayanan Umum Laporan Pendampingan Kearsipan	1	1	100	1	1	100
	Jumlah Total	36	36	100	37	37	100

Lampiran 4.

Realisasi Anggaran Sekretariat BPPSDM Per IKU Triwulan II 2024

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	OUTPUT/KOMPONEN	ANGGARAN / PAGU (Rp.)	REALISASI S.D TW II
Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat BRSDM			15.800.000.000	8.536.153.140
	Nilai PMPRB BRSDM (nilai)	Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	150.000.000	120.075.690
	Unit Kerja yang berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Lingkup BRSDM (kumulatif, unit)	Pembangunan dan Pembinaan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	152.400.000	19.374.010
	Unit kerja yang dibangun untuk diusulkan menuju WBK lingkup BRSDM (unit/Satker)	Penataan Kelembagaan Lingkup BRSDM	105.400.000	88.356.357
		Fasilitasi Evaluasi Organisasi dan Tata Laksana	92.200.000	57.452.134
	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK Sekretariat BRSDM dibandingkan Realisasi Anggaran Sekretariat BRSDM TA 2022 (%)	Penyusunan Laporan Keuangan	668.266.000	571.902.584
	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Sekretariat BRSDM (indeks)	Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah BRSDM KP	37.452.000	37.452.000
	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Sekretariat BPPSDM (%)	Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit	160.292.000	121.422.138
	Nilai IKPA Sekretariat BRSDM (nilai)	Perbendaharaan Administrasi Keuangan	133.990.000	110.862.486
	Nilai NKA Sekretariat BRSDM (nilai)	Perencanaan dan Revisi Anggaran Unit Eselon I BRSDM	359.483.000	118.561.340
	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Sekretariat BRSDM (indeks)	Pelayanan Perencanaan dan Pengembangan SDM Aparatur Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	113.143.000	80.821.022
		Peningkatan Kapasitas Pegawai	568.157.000	563.108.728
	Nilai PM SAKIP BRSDM (nilai)	Perencanaan Program	152.850.000	66.462.558
		Perencanaan Kinerja	128.867.000	60.381.168
Monitoring dan Evaluasi Manajerial dan SAKIP		221.710.000	129.283.755	

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	OUTPUT/KOMPONEN	ANGGARAN / PAGU (Rp.)	REALISASI S.D TW II
		Penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi Terpadu KP	88.500.000	-
		Rakor Kinerja BRSDM	680.540.000	247.750.130
	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Sekretariat BRSDM (Nilai)	Penyusunan Laporan Pelaksanaan Program Kegiatan BRSDM	64.530.000	797.661
	Persentase Unit kerja Lingkup Sekretariat BRSDM yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	Penerapan Manajemen Pengetahuan Terstandar BRSDM	17.400.000	1.000.000
	Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan BRSDM (%)	Layanan Informasi Publik	61.000.000	44.760.811
	Persentase Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup BRSDM (%)	Pengelolaan Barang Milik Negara Rumah Negara lingkup BRSDM KP	121.250.000	51.065.980
		Inventarisasi Sarana dan Prasarana dan Penyelesaian Permasalahan Administrasi dan Kepemilikan BMN	238.360.000	214.472.884
		Penyelesaian Penetapan Status Penggunaan dan Penghapusan BMN Satker BRSDM	125.600.000	68.325.366
	Persentase Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup BRSDM (%)	Pelaksanaan PBJ Lingkup Pusat dan Daerah	162.200.000	14.604.372
	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan lingkup BRSDM (%)	Fasilitasi Penyusunan Legislasi	354.720.000	80.401.915
	Nilai PNBPN BRSDM (Rupiah Miliar)	Pengelolaan PNBPN	201.500.000	60.428.171
			298.500.000	87.704.999
	Tenaga kerja yang terlibat lingkup BRSDM (orang)			
	Kerja Sama Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang Disepakati (Kesepakatan)	Penyusunan dan/atau Evaluasi Kesepakatan Kerjasama Internasional Lingkup Sekretariat dan/atau BRSDMKP	2.235.100.000	1.160.054.218

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	OUTPUT/KOMPONEN	ANGGARAN / PAGU (Rp.)	REALISASI S.D TW II
	Persentase Tindak Lanjut Kerja Sama Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang telah Disepakati (%)	Penyusunan dan/atau Evaluasi Kesepakatan Kerjasama Antarlembaga Lingkup Sekretariat dan/atau BRSDMKP	264.900.000	78.020.063
	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Sekretariat BRSDM (%)	Perencanaan Umum	1.858.800.000	1.739.741.871
		Monev program BRSDM Mendukung Prioritas KKP dan Amanah Nasional (Lintas Sektor)	180.310.000	9.256.000
		Penyusunan Laporan Kinerja Lingkup BRSDM	127.000.000	16.197.500
		Pengelolaan Aplikasi Bidang Monitoring dan Evaluasi	137.410.000	-
		Penyusunan Laporan BMN UAKPB Sekretariat BRSDMP KP dan UAPPBE-1 BRSDM KP	148.350.000	83.684.000
		Penyusunan Rencana Kebutuhan BMN Tahun 2023	204.240.000	-
		Pembinaan, Pengelolaan Ketatausahaan dan Persuratan	347.950.000	29.792.995
		Dukungan Layanan Kegiatan Kesekretariatan dan Tata Kelola Rumahtangga dan Tata Usaha Pimpinan serta Keprotokolan lingkup BRSDM	1.252.050.000	416.460.947
		Pelaksanaan Pengawasan Internal Kearsipan Lingkup BRSDM	261.000.000	240.666.707
		Pembinaan dan Pengelolaan Kearsipan BRSDM	83.000.000	76.018.114
		Percepatan Proses Pemusnahan Arsip In Aktif lingkup BRSDM	156.000.000	135.029.989
		Bimbingan Teknis Pengelolaan Arsip Dinamis		
		Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Riset dan Sumber Daya Manusia KP	200.000.000	191.350.000
		Pelayanan Kehumasan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	1.395.500.000	828.984.501
		Layanan Perpustakaan	43.500.000	7.966.100
	Penyelenggaraan Data Riset dan SDM KP	175.065.000	113.704.400	

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	OUTPUT/KOMPONEN	ANGGARAN / PAGU (Rp.)	REALISASI S.D TW II
		Forum Data dan Informasi BRSDM	184.250.000	998.600
		Pengelolaan Sistem Informasi Riset dan SDM KP	123.285.000	29.597.500
		Pengembangan/pengelolaan Sistem Informasi Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	500.000.000	136.800.000
		Advokasi Permasalahan Hukum	145.280.000	44.020.000
		Pelayanan Mutasi	81.600.000	44.405.430
		Pelayanan Ketatausahaan Kepegawaian	26.000.000	3.726.000
		Fasilitasi Verifikasi penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Lingkup BRSDM	193.100.000	128.852.796
		Validasi dan Updating Database SDM Lingkup BRSDM KP	18.000.000	3.997.150
Terpenuhinya Layanan Sarana dan Prasarana Internal			700.000.000	73.391.800
	Persentase pemenuhan layanan Sarana dan Prasarana Sekretariat BRSDM tepat waktu (%)	Layanan Sarana Internal	400.000.000	73.391.800
		Layanan Prasarana Internal	300.000.000	-
Terpenuhinya Layanan Perkantoran			35.275.000.000	14.396.581.435
	Persentase Pemenuhan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Lingkup BRSDM tepat waktu (%)	Gaji dan Tunjangan Sekretariat BRSDM	12.100.000.000	6.356.488.477
	Persentase Pemenuhan Layanan Perkantoran Lingkup BRSDM tepat waktu (%)	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	23.175.000.000	8.040.092.958
	BLOKIR PROGRAM		1.000.000.000	
	BLOKIR MONEV		1.500.000.000	
	BLOKIR SDM AO		1.500.000.000	
	BLOKIR SPIP		372.330.000	
	BLOKIR KEU		500.000.000	
	BLOKIR PNBP		29.170.000	
	BLOKIR BMN		500.000.000	
	BLOKIR HUMAS		1.000.000.000	
	BLOKIR KERJASAMA		500.000.000	
	BLOKIR HUKUM		500.000.000	
	BLOKIR UMUM		900.000.000	
	BLOKIR DATA		500.000.000	



SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	OUTPUT/KOMPONEN	ANGGARAN / PAGU (Rp.)	REALISASI S.D TW II
	BLOKIR BLU		98.500.000	
	BLOKIR BELANJA MODAL		1.500.000.000	
	TOTAL		62.175.000.000	23.006.126.375